



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN**

Jl. Pahlawan No.31 Madiun Telp. 0351-464151 fax. 0351-457580  
Web : [www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id](http://www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id) ; email : [info@bakorwilmadiun.jatimprov.go.id](mailto:info@bakorwilmadiun.jatimprov.go.id)

Madiun, 18 Januari 2023

Kepada:

Nomor : 065/ 022 /211.1/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Kinerja Tahun 2022

Yth. Sdr. Kepala Biro Organisasi  
Setda Prov. Jawa Timur  
di  
SURABAYA

Menindaklanjuti surat Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2022 Nomor : 069.5/49224/031.2/2022 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAKORWIL I MADIUN  
  
R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670221 198809 1 001



# LAPORAN KINERJA

## BAKORWIL I MADIUN

### TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN



*Melalui*  
**KOORDINASI DAN FASILITASI**  
yang Sinergis dengan Kabupaten / Kota  
Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik



**Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun  
Tahun 2022 menyajikan hasil  
pengukuran kinerja terhadap realisasi  
dari target Indikator Kinerja Bakorwil I  
Madiun yang telah ditetapkan dalam  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Segenap  
kemampuan, gagasan dan upaya terbaik  
telah dicurahkan dalam menjalankan  
tugas dan fungsi masing-masing dengan  
hasil kinerja seperti yang tertuang dalam  
laporan ini.**

# KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata, Laporan Kinerja (LKj) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Tahun 2022 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2022 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKj Bakowil I Madiun Tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal, dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Bakorwil I Madiun.

Madiun, 31 Desember 2022

KEPALA BAKORWIL I MADIUN



R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670221 198809 1 001

# DAFTAR

# ISI

<b>PEMBUKA</b>	<b>KATA PENGANTAR..... i</b>
	<b>DAFTAR ISI .....ii</b>
	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN ..... 1</b>
	A. Latar Belakang ..... 1
	B. Struktur Organisasi ..... 2
	C. Tugas Pokok dan Fungsi..... 3
	D. Wilayah Kerja ..... 4
	E. Isu Strategis ..... 4
	F. Cascading Kinerja..... 4
	G. Peta Proses Bisnis ..... 7
	H. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi ..... 9
	I. Sistematika Penyajian ..... 11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 12</b>
	A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 ..... 12
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... 13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 15</b>
	A. Capaian Kinerja ..... 15
	B. Realisasi Anggaran ..... 36
	C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi ..... 37
<b>PENUTUP</b>	<b>BAB IV PENUTUP ..... 38</b>
	A. Kesimpulan ..... 38
	B. Langkah yang akan dilakukan ..... 38

## LAMPIRAN:

1. Form Pendanaan Indikatif Renstra 2019-2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Rekapitulasi Data
4. Cascading Kinerja
5. Peta Proses Bisnis

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**Secara umum, capaian kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2022 dinyatakan “berhasil”. Pertama, SAKIP Bakorwil I Madiun mendapatkan predikat A (memuaskan) dengan nilai 80,83, yang kedua, persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 96,34%**

Bakorwil diberikan tugas untuk membantu Gubernur melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, kedudukan Bakorwil menjadi penting untuk mendorong keberhasilan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah kerjanya masing-masing.

Secara umum, capaian kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2022 dinyatakan “berhasil”. Pertama, SAKIP Bakorwil I Madiun mendapatkan predikat A (memuaskan) dengan nilai 80,83, dan yang kedua, persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti mencapai 100%, sesuai yang telah ditargetkan dalam perjanjian kinerja. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2022 cukup tinggi, yaitu sebesar 96,34%

Ke depan untuk mencapai sasaran Bakorwil I Madiun, maka diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja yang harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/kota.

# BAB I

## PENDAHULUAN

**Laporan Kinerja ini disusun sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja selama tahun 2022 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Bakorwil I Madiun, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Bakorwil I Madiun**

### A. Latar Belakang

Mengingat kondisi geografis Jawa Timur dan jangkauan rentang kendali cakupan wilayah 38 kabupaten/kota yang sangat luas, maka perlu dibentuk Bakorwil untuk membantu Gubernur melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten/kota. Bakorwil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan hal tersebut, peran Bakorwil sangat strategis dalam mewujudkan

visi Provinsi Jawa Timur yaitu **“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”** maka di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Bakorwil fokus dalam misi ke-3 yaitu **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.**

Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016.

## B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bakorwil I Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana bagan berikut ini:



### C. Tugas Pokok dan Fungsi



Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bakorwil menyelenggarakan fungsi:



Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya



Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan antar pemerintah kabupaten/kota



Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan



Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur



Monitoring, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan



Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)



Pemberdayaan dan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota



Optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah kabupaten/kota



Penyelarasan perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota



Dukungan teknis dan pengembangan potensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

#### D. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Bakorwil I Madiun meliputi 8 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu:



#### E. Isu Strategis

Permasalahan utama dan isu strategis di wilayah kerja Bakorwil I Madiun adalah belum optimalnya koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, diperlukan peran strategis Bakorwil yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

#### F. Cascading Kinerja

Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 telah menetapkan visinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu **Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif**

**melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.** Oleh karena itu, Bakorwil se-Jawa Timur selaku perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah mempunyai kebijakan, program dan kegiatan yang disusun untuk turut mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut. Adapun sasaran yang menjadi ruang lingkup Bakorwil se-Jawa Timur adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya, dengan fokus **misi ke-3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.**

**Tabel Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Peningkatan akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun
	2. Meningkatnya hasil koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Meningkatkan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

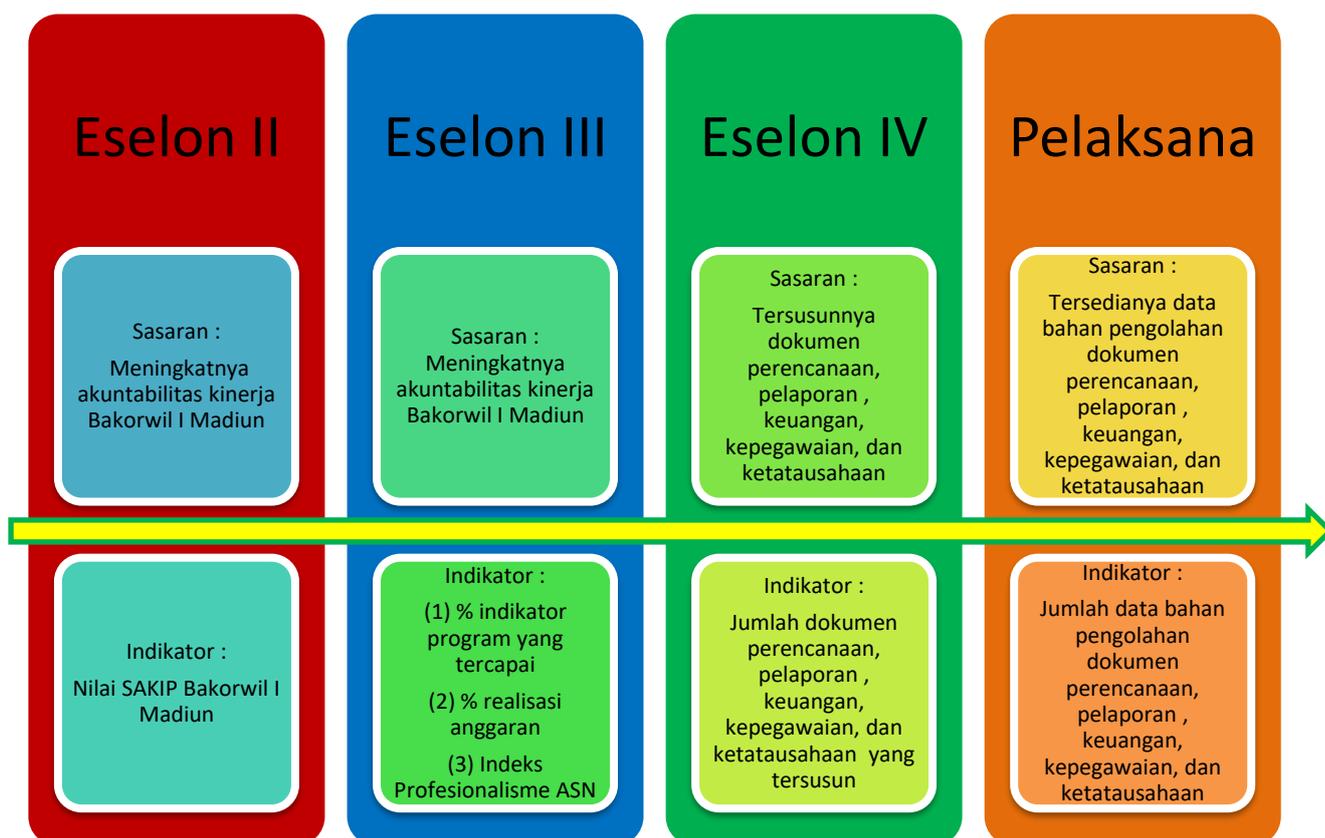
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cascading/pohon kinerja Bakorwil I Madiun dapat digambarkan sebagai berikut:

**SASARAN 1 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun

**INDIKATOR :**

Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun



## SASARAN 2 :

Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun

## INDIKATOR :

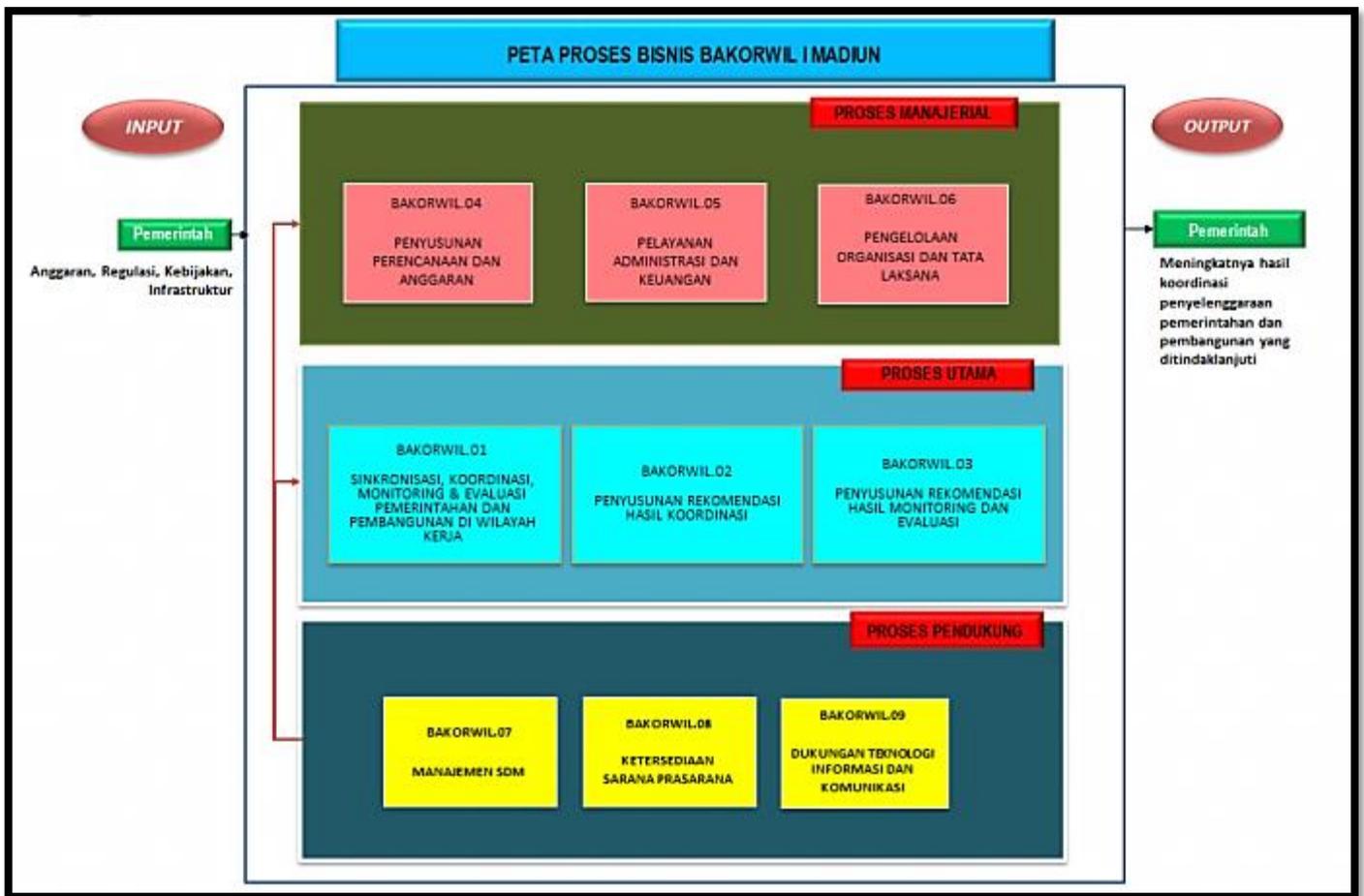
Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



## G. Peta Proses Bisnis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakorwil, maka yang menjadi proses bisnis utamanya adalah melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di wilayah kerjanya serta penyusunan rekomendasi hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sedangkan proses lain yang terkait perencanaan, tata kelola organisasi, administrasi dan keuangan merupakan proses manajerial di Bakorwil. Selain itu, yang menjadi

proses pendukungnya adalah manajemen SDM aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi.



Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/730/KPTS/013/2017 tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bakorwil I Madiun telah memiliki 22 SOP yang terkait dengan kegiatan kesekretariatan hingga kegiatan koordinasi dan moneyv masing-masing bidang.

#### H. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 19 September 2022, Nomor: 700/40047/031.2/2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bakorwil I Madiun Tahun 2022, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Bakorwil I Madiun memperoleh nilai 80,83 atau predikat A (Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Bakorwil I Madiun menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2021
a	Perencanaan Kinerja	30%	23,75
b	Pengukuran Kinerja	25%	16,88
c	Pelaporan Kinerja	15%	13,91
d	Evaluasi Kinerja	10%	7,02
e	Pencapaian Kinerja	20%	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	<b>80,05</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A (Memuaskan)</b>

*\*Dasar : PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015*

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2022
a	Perencanaan Kinerja	30%	23,94
b	Pengukuran Kinerja	30%	27,83
c	Pelaporan Kinerja	15%	11,46
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,59
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	<b>80,83</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A (Memuaskan)</b>

*\*Dasar : PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021*

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja internal agar senantiasa melakukan upaya inovasi sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan pada lingkungan Bakorwil I Madiun;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan melakukan penyelarasan antar dokumen perencanaan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD 2019-2024;
3. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja;
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja;

6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Bakorwil I Madiun.

## I. Sistematika Penyajian

<b>Bab I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> , menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, wilayah kerja, isu strategis, cascading kinerja, peta proses bisnis, ringkasan Laporan Hasil Evaluasi, dan sistematika penyajian
<b>Bab II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b> , menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bakorwil I Madiun Tahun 2022 meliputi Rencana Strategis Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
<b>Bab III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> , menjelaskan pengukuran tingkat pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun, hasil pengukuran kinerja, perbandingan dengan target Renstra, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya, analisa efisiensi sumber daya, akuntabilitas keuangan, dan tindak lanjut hasil evaluasi
<b>Bab IV</b>	<b>PENUTUP</b> , menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Bakorwil I Madiun Tahun 2022 serta rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang

# BAB II

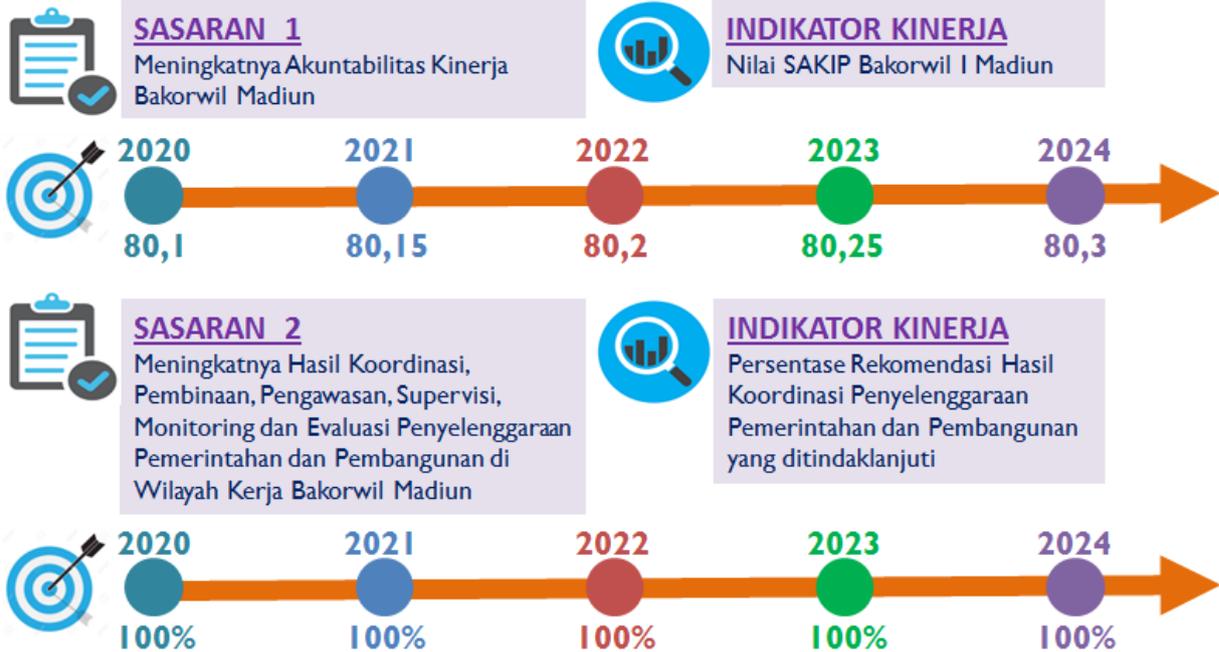
## PERENCANAAN KINERJA

### A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024

Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Bakorwil I Madiun yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

TUJUAN	SASARAN	
<b>Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun</b>	Uraian	Indikator
	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun
	2.Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti

## TARGET KINERJA 2020-2024



### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2022 dengan sasaran, indikator kinerja dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,2
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%

Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2022 yang ingin dicapai, maka disusunlah program dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun. Program tahun 2022 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>13.490.251.500</b>
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan Penghubung</b>	<b>1.261.769.500</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.752.021.000</b>

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.



### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,2	80,83	100,79%
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Formula : % = $\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi}}$ = $\frac{16}{16}$ = 100%			

### **Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun**

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi nilai SAKIP Bakorwil I Madiun tahun 2022 adalah 80,83, sedangkan target nilai SAKIP yang ingin dicapai adalah 80,2, sehingga capaian kerjanya 100,79%. Dalam hasil evaluasi SAKIP oleh Tim SAKIP Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai di komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan sedikit penurunan nilai di komponen pelaporan kinerja, sehingga perlu adanya upaya untuk memperbaiki komponen pelaporan kinerja dengan memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, pengukuran, dan reviu kinerja internal secara berkala dan berjenjang serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan mekanisme tersebut.

### **Indikator Kinerja 2 : Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti**

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti tahun 2022 adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai adalah 100%, sehingga capaian kerjanya terpenuhi 100%. Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sudah tercapai sebesar 100% dari target 16 koordinasi yang ditindaklanjuti.

Adapun hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 16 (enam belas) koordinasi sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KOORDINASI</b>	<b>TINDAK LANJUT REKOMENDASI</b>
1.	Koordinasi dan Monitoring Arsip SMA dan SMK Swasta se-Bakorwil I Madiun Tahun 2022	Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 31 Maret 2022 Nomor : 045/141.2/211.2/2022 kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Bakorwil I

		<p>Madiun perihal Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Monitoring Arsip SMA dan SMK Swasta se-Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar setiap lembaga SMA dan SMK negeri maupun swasta mempunyai tenaga pengelola arsip atau arsiparis yang berkompeten untuk mengelola, mendayagunakan dan menyelamatkan arsip sekolah sesuai kaidah kearsipan yang didukung dengan sarana prasarana dan anggaran yang memadai;</li> <li>2. Agar mengusulkan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan arsip bagi lembaga SMA dan SMK negeri maupun swasta kepada dinas teknis terkait (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur);</li> <li>3. Pentingnya dan perlunya alih media sebagai alternatif dalam penyimpanan arsip untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan bencana alam dan serangan serangga;</li> <li>4. Tingkatkan sinergitas dengan Dinas/Instansi terkait untuk melakukan pembinaan pengelolaan arsip SMA dan SMK negeri maupun swasta secara berkala agar arsip aman dan berdaya guna.</li> </ol>
2.	<p>Koordinasi dan Monitoring Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah pada Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 28 April 2022 Nomor : 100/173.1/211.2/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Hasil Koordinasi dan Monitoring Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah pada Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun yang telah melaksanakan kerja sama pembangunan antar daerah agar ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh OPD terkait sesuai dengan bidang dan sektor prioritas kebutuhan daerah;</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama pembangunan antar daerah di wilayah Selingkar Gunung Wilis Tunggal Rogo Mandiri telah vakum selama pandemi COVID-19, maka perlu dilakukan</li> </ol>

		<p>pembaharuan kerja sama pembangunan antardaerah sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 yang melibatkan para pihak terkait (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Perhutani);</p> <p>3. Dalam mengadakan kerja sama perlu dukungan regulasi dan komitmen, anggaran, sarana prasarana, SDM yang berkompeten, relasi dan partisipasi antara dinas/instansi/lembaga dan masyarakat;</p> <p>4. Optimalisasi peran TKKSD Kabupaten/Kota dalam meningkatkan koordinasi, komunikasi, fasilitasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama pembangunan antardaerah sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dan didukung dengan anggaran, SDM dan sarana prasarana yang memadai.</p>
3.	<p>Koordinasi Penyelamatan dan Pemanfaatan Pemanfaatan Arsip Sekolah Tingkat SMA dan SMK Swasta se-Bakorwil I Madiun</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 31 Mei 2022 Nomor : 045/187.2/211.2/2022 kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Bakorwil I Madiun perihal Hasil Rapat Koordinasi Penyelamatan dan Pemanfaatan Pemanfaatan Arsip Sekolah Tingkat SMA dan SMK Swasta se-Bakorwil I Madiun sebagai berikut:</p> <p>1. Perlunya meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada pihak-pihak terkait dalam hal penanganan, penyelamatan dan pemanfaatan arsip sekolah tingkat SMA dan SMK swasta serta PKLK se-Bakorwil I Madiun;</p> <p>2. Perlunya meningkatkan kepedulian dan dukungan dari sekolah tingkat SMA dan SMK swasta serta PKLK se-Bakorwil I Madiun dalam melaksanakan tata kelola arsip menurut kaidah kearsipan karena arsip sebagai alat atau bahan perumusan pelaksanaan kebijakan sekolah;</p> <p>3. Pentingnya penyelamatan dan pemanfaatan arsip vital sekolah tingkat SMA dan SMK swasta serta PKLK untuk kelangsungan operasional pencipta arsip sekolah karena arsip tersebut</p>

		<p>tidak dapat diperbaharui atau tergantikan apabila rusak atau hilang;</p> <p>4. Pentingnya melakukan penyelamatan arsip vital sekolah melalui alih media arsip dengan melakukan digitalisasi arsip sekolah.</p>
4.	<p>Koordinasi dan Monitoring Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 29 Juni 2022 Nomor : 470/209.2/211.2/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Hasil Koordinasi dan Monitoring Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penting dan perlunya tertib administrasi kependudukan yang meliputi tertib database kependudukan, tertib dokumen kependudukan dan tertib administrasi kependudukan;</li> <li>2. Optimalisasi update dan pemutakhiran data administrasi kependudukan;</li> <li>3. Penting dan perlunya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan termasuk akta kematian dan optimalisasi pencatatan warga yang meninggal dunia pada Buku Pokok Pemakaman;</li> <li>4. Terus lakukan inovasi atau terobosan secara berkelanjutan guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.</li> </ol>
5.	<p>Koordinasi Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022 se-Bakorwil I Madiun</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 25 Maret 2022 Nomor : 510/132/211.3/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Hasil Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022 se-Bakorwil I Madiun sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan diharapkan sering melaksanakan monitoring lapangan, baik di pasar rakyat/tradisional</li> </ol>

		<p>maupun pasar modern agar harga barang kebutuhan pokok tetap terjangkau;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan langkah-langkah persiapan melalui rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan stakeholder terkait persiapan menjelang Hari BesarKeagamaan Nasional (HKBN) tahun 2022;</li> <li>3. Mengoptimalkan peran Tim Satgas Pangan dalam menjaga kestabilan harga dan kelancaran distribusi serta ketersediaan stok agar tetap meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait;</li> <li>4. Melakukan himbauan kepada pelaku usaha untuk menjaga harga pada level yang wajar, terutama menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri1443 H Tahun 2022;</li> <li>5. Koordinasi yang intensif antar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, pihak Swasta, Distributor dan Produsen serta Sentra Produksi perlu lebih ditingkatkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022.</li> </ol>
6.	<p>Koordinasi dan Monitoring Konfirmasi Data Lapangan Koperasi Tidak Aktif di wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2022</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 2 Juni 2022 Nomor : 518/190.1/211.3/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Koordinasi dan Monitoring Konfirmasi Data Lapangan Koperasi Tidak Aktif di wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data koperasi tidak aktif yang disampaikan oleh Bakorwil I Madiun sudah benar secara umum sudah sesuai dengan Online Data Sistem (ODS), Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun diharapkan agar selalu melakukan pemutakhiran data koperasi secara berkala;</li> <li>2. Koperasi binaan Provinsi Jawa Timur yang tetap beroperasi dan tetap melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tetapi hanya</li> </ol>

		<p>melaporkan kepada Dinas Koperasi Kabupaten/Kota, agar juga dilaporkan langsung kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur;</p> <p>3. Dengan revitalisasi koperasi kurang aktif/tidak aktif diharapkan koperasi tersebut secara kelembagaan dan usaha akan bisa berjalan lagi, sehingga bisa melayani kebutuhan anggota dan masyarakat sekitarnya serta dengan memasukan koperasi menjadi indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.</p>
7.	<p>Koordinasi dan Fasilitasi Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak menghadapi Hari Raya Idul Adha 1443 H se Bakorwil I Madiun Tahun 2022</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 9 Juni 2022 Nomor : 524/197/211.3/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Hasil Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Antisipasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak menghadapi Hari Raya Idul Adha 1443 H se Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten/kota agar melakukan pendataan jumlah hewan yang terpapar dan potensi rentan penyakit mulut dan kuku berbasis desa dan atau kecamatan untuk kesiapan vaksinasi, dan melaporkan kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>2. Kabupaten/Kota agar menginput data penyakit mulut dan kuku secara real time melalui iNSIKHNAS (sistem informasi kesehatan hewan nasional);</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten/Kota agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa daging yang positif penyakit mulut dan kuku bisa dikonsumsi dengan cara dimasak terlebih dahulu;</li> <li>4. Kabupaten/kota agar menyiapkan anggaran, obat-obatan, sarana prasarana pendukung pengendalian dan operasional petugas vaksin;</li> <li>5. Dalam menghadapi Idul Adha Pemerintah Kabupaten/Kota agar menertibkan mobilitas perdagangan hewan qurban;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kabupaten/Kota agar menetapkan status wilayah bebas, wilayah terduga, wilayah tertular dan wilayah wabah;</li> <li>7. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum tertentu;</li> <li>8. Kabupaten/kota segera menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner;</li> <li>9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan penyemprotan desinfektan di Rumah Potong Hewan (RPH) serta di Pasar hewan dan tidak disarankan masuk di wilayah kandang ternak;</li> <li>10. Pengajuan/pengelolaan anggaran untuk kegiatan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku agar mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
8.	Koordinasi Peningkatan Sistem Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya melalui Pemanfaatan Web Bakorwil I Madiun Tahun 2022	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 27 September 2022 Nomor : 510/339.2/211.3/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Sistem Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya melalui Pemanfaatan Web Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan diharapkan sering melaksanakan monitoring lapangan, baik di pasar rakyat/tradisional maupun pasar modern agar harga barang kebutuhan pokok tetap terjangkau dikalangan masyarakat;</li> <li>2. Melakukan langkah-langkah persiapan melalui rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan stakeholder terkait persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) tahun 2022;</li> <li>3. Mengoptimalkan peran Tim Satgas Pangan dalam menjaga kestabilan harga dan kelancaran</li> </ol>

		<p>distribusi serta ketersediaan stok agar tetap meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan himbauan kepada pelaku usaha untuk menjaga harga pada level yang wajar;</li> <li>5. Koordinasi yang intensif antar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, pihak Swasta, Distributor dan Produsen serta Sentra Produksi perlu lebih ditingkatkan untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.</li> </ol>
9.	<p>Koordinasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Pergub Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja se-Bakorwil I Madiun Tahun 2022</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 19 Januari 2022 Nomor : 560/022/211.4/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Hasil Rapat Koordinasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Pergub Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja se-Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuat regulasi terkait penganggaran Jaminan Sosial bagi pegawai non ASN pada APBD termasuk bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Pekerja Rentan), apabila belum dianggarkan diharapkan tahun 2023 agar dialokasikan anggaran untuk memperluas cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>2. BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kolaborasi dengan beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorwil I Madiun, dan sebagian sudah melakukan MoU dengan kepala daerah yang ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan dinas terkait;</li> <li>3. Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan/inventarisasi terhadap potensi keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja (Guru PTT/GTT, outsourcing, nelayan, petani, UMKM/PKL, buruh tani, buruh nelayan, petugas</li> </ol>

		<p>pemilu, pengawas pemilu serta dan lain-lain), sesuai dengan bidang masing-masing untuk kemudian disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Bakorwil I Madiun;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kabupaten/Kota, KPU dan Bawaslu terus melakukan sosialisasi kepada stakeholder masing-masing untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>5. Terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait termasuk Bappeda dan BPKAD, BPJS dan lembaga terkait untuk pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>6. Apabila anggaran Kabupaten/Kota terbatas, perlu mendorong kepada masing-masing tenaga kerja (kerja (Guru PTT/GTT, outsourcing, nelayan, petani, UMKM/PKL, buruh tani, buruh nelayan, petugas pemilu, pengawas pemilu serta dan lain-lain), agar secara sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan level dasar (untuk JKK dan JKM).</li> </ol>
10.	<p>Koordinasi dan Monitoring Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak se-Bakorwil I Madiun Tahun 2022</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 25 Februari 2022 Nomor : 353/100/211.4/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Monitoring Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak se-Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi anggaran untuk kegiatan perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan;</li> <li>2. Tercukupinya tenaga pendampingan kasus yang kompeten (psikolog);</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama dengan Praktisi dan Akademisi;</li> <li>4. Terkait ABH (Anak Bermasalah Hukum) agar dilakukan pendampingan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak terutama masalah pendidikan usah tetap berlanjut;</li> <li>5. Mendorong kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengalokasikan sebagian Dana Desa dan</li> </ol>

		Alokasi Dana Desa untuk penanganan anak terdampak COVID-19.
11.	Koordinasi dan Monitoring Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular COVID-19, TBC dan DBD pada masa pandemi di Kabupaten/Kota se Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2022	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 22 Maret 2022 Nomor : 440/128/211.4/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Hasil Koordinasi dan Monitoring Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular COVID-19, TBC dan DBD pada masa pandemi di Kabupaten/Kota se Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten/Kota terus menghimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dan memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi melalui kerjasama dengan stakeholder terkait;</li> <li>2. Pada masa pandemi COVID-19, temuan kasus TBC mengalami penurunan hal ini disebabkan karena masyarakat takut untuk datang kefasilitas kesehatan/takut memeriksakan dahak karena takut dicovidkan, agar temuan kasus TBC dapat optimal maka Kabupaten/Kota agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengaktifkan kembali Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);</li> <li>b. Membuat Rencana Aksi Daerah terkait dengan penanggulangan TBC;</li> <li>c. Memperkuat jejaring layanan TB;</li> <li>d. Membentuk Tim Public Privat Mix bagi Kabupaten/Kota yang belum membentuk;</li> </ol> </li> <li>3. Dalam rangka mencegah terjadinya endemi Demam Berdarah Dengue, agar Kabupaten/Kota mengaktifkan kembali gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan 3M Plus dengan melibatkan stakeholder terkait, termasuk mengaktifkan kembali kader jumentik yang akhir-akhir ini (masa pandemi COVID-19) mengalami kevakuman.</li> </ol>
12.	Koordinasi Pengembangan Desa Wisata se-Bakorwil I Madiun Tahun 2022	Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 20 Juni 2022 Nomor : 476/208/211.4/2022 kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiun perihal Hasil

		<p>Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Wisata se-Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam mengembangkan potensi wisata di selingkar wilis, Pemerintah Kabupaten/Kota berharap Bakorwil I Madiun agar lebih sering memfasilitasi rapat-rapat koordinasi;</li> <li>2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur siap membantu meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa wisata dengan direct promotion dan melibatkan biro travel setiap kunjungan dan berkegiatan ke daerah;</li> <li>3. Rapat koordinasi pengembangan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sangat membantu dalam memberikan panduan dalam mengembangkan desa wisata baik bagi pemerintah daerah dan kepada pelaku desa wisata;</li> <li>4. Kabupaten/Kota dalam menetapkan desa wisata agar berdasar pada potensi sebagai sebuah desa wisata yang telah ditentukan;</li> <li>5. Dalam mengembangkan desa wisata tetap mengedepankan kelestarian alam dan budaya yang berkelanjutan;</li> <li>6. Mendorong desa sekitar menjadi penyangga dengan layanan dan produk-produk UMKM di desanya;</li> <li>7. Merumuskan dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam usaha membangun dan mengembangkan desa wisata;</li> <li>8. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam rangka membangun dan mengembangkan desa wisata.</li> </ol>
13.	Koordinasi dan Tinjauan Lapangan Jalan Banjir di ruas jalan BTS, Kabupaten Kediri-BTS, Kabupaten Blitar (KM SBY 144+100 s.d. 144+300)	Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 21 Januari 2022 Nomor : 600/032.1/211.5/2022 kepada Kepala UPT PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Kediri perihal Rekomendasi Hasil Tinjauan Lapangan Jalan Banjir di ruas jalan BTS, Kabupaten Kediri-BTS,

		<p>Kabupaten Blitar (KM SBY 144+100 s.d. 144+300) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukannya rehabilitasi saluran berupa pembongkaran bangunan diatas saluran, pengangkatan sedimen dan endapan di saluran sungai;</li> <li>2. Perlunya penertiban pedagang kaki lima yang menempati saluran air dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di atas saluran air;</li> <li>3. Perlunya perbaikan saluran dan pelebaran saluran, apabila diperlukan pemasangan bak kontrol dan penutup saluran;</li> <li>4. Penanganan banjir diatas apabila telah dilaksanakan dan dirasa kurang efektif maka dapat dilakukan pembangunan gorong-gorong melintang jalan (sisi timur ke barat) menggunakan box culvert.</li> </ol>
14.	<p>Penilaian Kinerja Kelompok HIPPA dan GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dari wilayah Bakorwil I Madiun</p>	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 20 Mei 2022 Nomor : 611.6/ 181 /211.5/2022 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur perihal Rekomendasi Penilaian Kinerja Kelompok HIPPA dan GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dari wilayah Bakorwil I Madiun sebagai berikut:</p> <p>Bakorwil I Madiun merekomendasikan peserta kelompok HIPPA dan GHIPPA untuk mengikuti Penilaian Kinerja Kelompok HIPPA dan GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dari Bakorwil I Madiun sebagai berikut :</p> <p>I. Kategori HIPPA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok HIPPA "MARGO MULYO" Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek</li> <li>2. Kelompok HIPPA "GUNO TIRTO" Desa Cempoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi</li> </ol>

		<p>II. Kategori GHIPPA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok GHIPPA "SUMBER REJEKI" Desa Ngantep, Kecamatan Kawedenan, Kabupaten Magetan</li> <li>2. Kelompok GHIPPA "DADI MULYO" Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kab. Tulungagung</li> </ol>
15.	Laporan Hasil Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pertambangan di wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2022	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 20 September 2022 Nomor : 611.6/312/211.5/2022 kepada Ibu Gubernur Jawa Timur perihal Laporan Hasil Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pertambangan di wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedelegasian Kewenangan Pemberian Perijinan Pertambangan, di Wilayah Bakorwil I Madiun terdapat Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebanyak 129 ijin yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten di Wilayah Bakorwil I Madiun;</li> <li>2. Perlunya pengawasan lebih ketat oleh stakeholder terkait dikarenakan masih adanya Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) di Wilayah Bakorwil I Madiun dengan melakukan penambangan tegak lurus dan tidak memperhatikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik;</li> <li>3. Perlunya peningkatan peran Kepala Teknik Tambang (KTT), sehingga dalam melakukan penambangan akan menerapkan kaidah – kaidah teknik pertambangan yang baik;</li> <li>4. Perlu adanya informasi terkait pemasaran komoditi tambang yang saat ini masih ada pengusaha tambang kesulitan untuk memasarkan komoditi tambangnya sehingga produksi pertambangan berhenti sementara;</li> <li>5. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) mengharapkan dibentuk sebuah wadah/organisasi yang menampung</li> </ol>

		<p>permasalahan/sengketa pertambangan dengan pihak-pihak tertentu, sehingga tidak mengganggu proses produksi kegiatan pertambangan;</p> <p>6. Penambahan jumlah Inspektur Tambang atau dibentuk suatu tim dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk pengawasan kegiatan pertambangan, dikarenakan keterbatasan dari petugas Inspektur Tambang.</p>
16.	Koordinasi dan Tinjauan Lapangan Banjir Limbah PG Modjopanggung Kabupaten Tulungagung	<p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 28 Oktober 2022 Nomor : 600/381/211.5/2022 kepada Direktur PG. Modjopanggung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukannya koordinasi dengan Forkopimda Kecamatan Kauman untuk mengakomodir kerugian dan dampak banjir luapan limbah;</li> <li>2. Perlunya mengoptimalkan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) agar limbah tidak mencemari lingkungan;</li> <li>3. Perlunya memperbaiki dan memfungsikan kembali kolam penampungan limbah yang ada, dan sementara waktu agar limbah tidak disalurkan ke Sungai Song;</li> <li>4. Perlu adanya bentuk pertanggungjawaban PG. Modjopanggung kepada warga masyarakat yang terdampak banjir disertai limbah.</li> </ol>

## 2. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu

Realisasi kinerja tahun 2021 dan 2022 dibandingkan dapat dilihat pada grafik berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,15	80,2	80,05	80,83

2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
---	---	---	------	------	------	------

### 1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun



### 2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



### 3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir Renstra 2019-2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra Bakorwil I Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

#### 1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun



Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi nilai SAKIP Bakorwil I Madiun tahun 2022 sebesar **80,83** dengan target akhir Renstra Tahun 2019-2024 sebesar **80,3**, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2022 dengan target tahun akhir Renstra sebesar **100,66%**.

#### 2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar **100%** dengan target akhir Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 sebesar **100%**, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2022 dalam menjalankan tugas koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada kabupaten/kota se-wilayah Bakorwil I Madiun mengalami tingkat kemajuan hingga tahun akhir Renstra sebesar **100%**.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan tercermin dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2022 adalah persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti, dengan target 100%. Dari target tersebut realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan atau sub kegiatan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Bakorwil I Madiun atau oleh perangkat daerah terkait.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui **keberhasilan** Bakorwil I Madiun dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2022 antara lain yaitu:

##### **1. Faktor Internal**

Faktor internal dari dalam organisasi menjadi penentu atas keberhasilan Bakorwil I Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. Jumlah dan kualitas SDM yang memadai,
- b. Sarana dan prasarana penunjang yang semakin memadai,
- c. Tugas pokok dan fungsi yang jelas,
- d. Komitmen, komunikasi dan kerjasama yang baik,

- e. Capaian realisasi penyerapan anggaran yang cukup tinggi (96,31%),
- f. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan prioritas perangkat daerah,
- g. Sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja jelas dan terukur.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari luar organisasi yang ikut andil atas keberhasilan Bakorwil I Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur,
- b. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder yang baik,
- c. Pengakuan dan peran Bakorwil yang dibutuhkan oleh pihak terkait,
- d. Adanya pembinaan secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- e. Program kegiatan yang dilaksanakan sinergis dengan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau OPD kabupaten/kota,
- f. Manfaat program kegiatan dapat dirasakan oleh daerah atau OPD terkait dan masyarakat.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Aspek Manajemen: sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
- Aspek Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah SDM terkait dan kompetensi SDM yang belum seimbang dengan jumlah pegawai, hal ini yang tentunya bisa menjadi kendala. Selama ini mengoptimalkan SDM

yang ada dan mengikutkan/mengirim pegawai pelatihan baik formal maupun non formal.

- Perlunya dukungan anggaran yang proporsional untuk melaksanakan program dan kegiatan baik rutin maupun pembangunan serta tugas-tugas dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Provinsi di wilayah kerja Bakorwil I Madiun.
- Aspek Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga sering mengalami gangguan, pemeliharaan sarana dan prasarana menyebabkan beberapa tugas kedinasan ada yang belum optimal, sehingga kedepan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun pemeliharannya perlu ditingkatkan.
- Aspek Program, Kegiatan dan Penganggaran: Bakorwil I Madiun didukung oleh 2 program dengan 7 kegiatan dan 35 sub kegiatan .

#### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	<b>100,79%</b>	<b>98,26%</b>	<b>2,53%</b>
2.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	<b>100%</b>	<b>99,21%</b>	<b>0,79%</b>

Alokasi per sasaran pembangunan dibanding dengan jumlah belanja langsung tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

### Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	Rp 2.620.919.000	82,35%
2.	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Rp 561.920.000	17,65%

PAPBD Bakorwil I Madiun Tahun 2022 sebesar Rp 15.994.515.000, dengan komposisi belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 12.811.676.000 dan belanja program sebesar Rp 2.620.919.000. Untuk sasaran strategis pertama ditunjang dengan 1 (satu) program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 2.620.919.000 (82,35%). Sedangkan untuk sasaran kedua ditunjang 1 (satu) program, Program Pelayanan Penghubung dengan anggaran Rp 561.920.000 (17,65%).

### Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,2	80,83	100,79%	2.620.919.000	2.575.248.177	98,26%
<b>Program:</b> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							

<b>Sasaran:</b> Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	561.920.000	557.498.025	99,21%
<b>Program:</b> Program Pelayanan Penghubung							

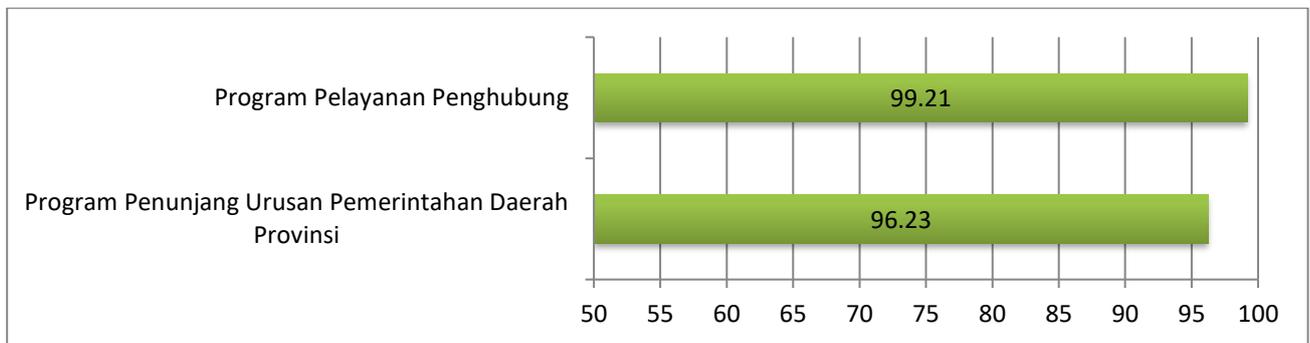
## B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan atas pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil I Madiun tahun 2022 berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Adapun alokasi anggaran Bakorwil I Madiun tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

### Program, Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.432.595.000	14.851.082.036	96,23
2	Program Pelayanan Penghubung	561.920.000	557.498.025	99,21
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.994.515.000</b>	<b>15.408.580.061</b>	<b>96,34</b>



### C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 19 September 2022, Nomor: 700/40047/031.2/2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bakorwil I Madiun Tahun 2022, berikut upaya-upaya yang telah dan sedang kami lakukan:

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, kami selalu melakukan koordinasi untuk keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan antar bidang maupun dengan perangkat daerah lain yang terkait;
2. Dengan adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan yang mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, kami bersama seluruh perangkat daerah di Jawa Timur, saat ini sedang melakukan tahapan reviu Renstra Tahun 2019-2024 agar selaras dengan Permendagri tersebut;
3. Secara bertahap, kami telah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masing-masing ASN agar dalam penyusunan SKP diselaraskan dengan perjanjian kinerja yang telah disusun dan merupakan hasil breakdown perjanjian kinerja atasan langsung dan kinerja organisasi secara umum;
4. Bakorwil I Madiun selalu melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara mengusulkan formasi tambahan ASN kepada BKD Provinsi Jawa Timur, mengingat dari segi jumlah ASN masih kurang ideal, dan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan internal bagi ASN Bakorwil I Madiun seperti penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja, penyusunan SKP, dan pengelolaan tata naskah dinas.

# BAB IV

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun Tahun 2022 ini telah menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2022. Laporan ini merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, bahwa pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun

**Sasaran 1:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun

**Indikator** : Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun (**capaian 100,79%**)

**Sasaran 2:** Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun

**Indikator** : Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti (**capaian 100%**)

3. Capaian realisasi anggaran Bakorwil I Madiun tahun 2022 sebesar **96,34%**

### B. Langkah yang akan dilakukan

1. Bakorwil I Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, kerjasama dan monitoring serta evaluasi dengan stakeholder terkait dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar kinerjanya dapat meningkat;

2. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Bakorwil I Madiun agar tertib administrasi sesuai dengan ketentuan atas penyusunan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan program dan kegiatan serta dokumen pelaporan maupun evaluasi;
3. Berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Bakorwil I Madiun agar memiliki kompetensi yang memadai.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Form Pendanaan Indikatif Renstra 2019-2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Rekapitulasi Data
4. Cascading Kinerja
5. Peta Proses Bisnis

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bakorwil I Madiun**  
**Provinsi Jawa Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab	Lokasi											
							Tahun-1 (2020)		Tahun-2 (2021)		Tahun-3 (2022)		Tahun-4 (2023)		Tahun-5 (2024)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH														
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp													
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun	1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	3	1	4	0	1	1	Program Pelayanan Kesekretariatan	1.Persentase Indikator Program	95%	100%	4.225.000.000	100%	4.264.575.900	100%	4.309.537.900	100%	4.389.534.100	100%	4.529.326.500	100%		Bakorwil I Madiun	Madiun						
								2	2.Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%		96%		96%		96%		96%		96%										
								3	3.Indeks Profesionalisme ASN	-	75		77		79		81		83		83										
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	1	4	0	1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	6	6 dok	147.000.000	6 dok	148.000.000	6 dok	155.000.000	6 dok	160.000.000	6 dok	165.000.000	30 dok		Bakorwil I Madiun	Madiun						
			3	1	4	0	1	0	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase realisasi anggaran	96%	96%	28.000.000	96%	28.500.000	96%	29.000.000	96%	29.500.000	96%	30.000.000	96%		Bakorwil I Madiun	Madiun						
			3	1	4	0	1	0	Ketetausahaan dan Kepegawaian	Indeks profesionalisme ASN	-	75	4.050.644.500	77	4.088.075.900	79	4.125.537.900	81	4.200.034.100	83	4.334.326.500	83		Bakorwil I Madiun	Madiun						
			3	1	4	1	5	0	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan EJSC	-	70	350.000.000	71	450.000.000	72	500.000.000	73	550.000.000	74	600.000.000	74		Bakorwil I Madiun	Madiun						
			3	1	4	1	5	0	Millenial Job Center (MJC)	Jumlah Generasi Milenial yang difasilitasi	-	200 orang	150.000.000	250 Orang	155.000.000	300 orang	160.000.000	350 orang	170.000.000	400 orang	180.000.000	1500 orang.									
			3	1	4	1	5	0	Service Point	Jumlah Masyarakat yang terlayani	-	200 orang	100.000.000	250 Orang	105.000.000	300 orang	110.000.000	350 orang	115.000.000	400 orang	125.000.000	1500 orang									
			3	1	4	1	5	0	Sinkronisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-	6 Dok.	100.000.000	6 Dok.	105.000.000	6 Dok.	110.000.000	6 Dok.	115.000.000	6 Dok.	125.000.000	30 Dok.									
			3	1	4	2	1	0	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	95%	96%	450.000.000	97%	460.000.000	98%	470.000.000	99%	490.000.000	100%	510.000.000	100%		Bakorwil I Madiun	Madiun						
			3	1	4	2	1	0	Sinkronisasi Penyelenggaraan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub	3 dok.	4 dok.	177.500.000	4 dok.	180.000.000	5 dok.	185.000.000	5 dok.	195.000.000	6 dok.	205.000.000	24 dok.		Bakorwil I Madiun	Madiun						







**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDY SUPRIYANTO, S.STP, M.PSDM

Jabatan : Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 31 Oktober 2022



Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BAKORWIL I MADIUN**

**EDDY SUPRIYANTO, S.STP, M.PSDM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750319 199511 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,2	- Penguatan Internal - Anggaran
2.	Meningkatnya hasil koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	Penerima Layanan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 15.432.595.000	PAPBD
2. Program Pelayanan Penghubung	Rp 561.920.000	PAPBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15.994.515.000</b>	

Madiun, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**



*[Signature]*  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BAKORWIL I MADIUN**

*[Signature]*  
**EDDY SUPRIYANTO, S.STP, M.PSDM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750319 199511 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, M.M.

Jabatan : Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 1 Desember 2022

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
  
**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BAKORWIL I MADIUN**  
  
**R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670221 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun	Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun	80,2	- Penguatan Internal - Anggaran
2.	Meningkatnya hasil koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	Penerima Layanan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 15.432.595.000	PAPBD
2. Program Pelayanan Penghubung	Rp 561.920.000	PAPBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15.994.515.000</b>	

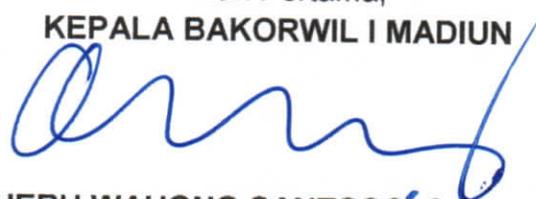
Madiun, 1 Desember 2022

Pihak Kedua,  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**



**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BAKORWIL I MADIUN**



**R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670221 198809 1 001

**CAPAIAN KINERJA BIDANG-BIDANG  
BAKORWIL I MADIUN TAHUN 2022**

<b>Bidang</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Jumlah Rekomendasi</b>	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi</b>	<b>Realisasi (5/4)</b>	<b>Capaian (6/3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	4	4	100%	100%
Pembangunan Ekonomi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	4	4	100%	100%
Kemasyarakatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%	4	4	100%	100%
Sarana dan Prasarana	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti	100%	4	4	100%	100%
<b>Jumlah/rata-rata</b>		<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

# KETERKAITAN RENSTRA BAKORWIL I MADIUN 2019-2024 DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024

## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

### VISI :

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong

### MISI 3:

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan



## Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024

### TUJUAN:

Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun

### INDIKATOR TUJUAN:

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti

### SASARAN :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Madiun
2. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun

### INDIKATOR SASARAN :

1. Nilai SAKIP Bakorwil Madiun
2. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti

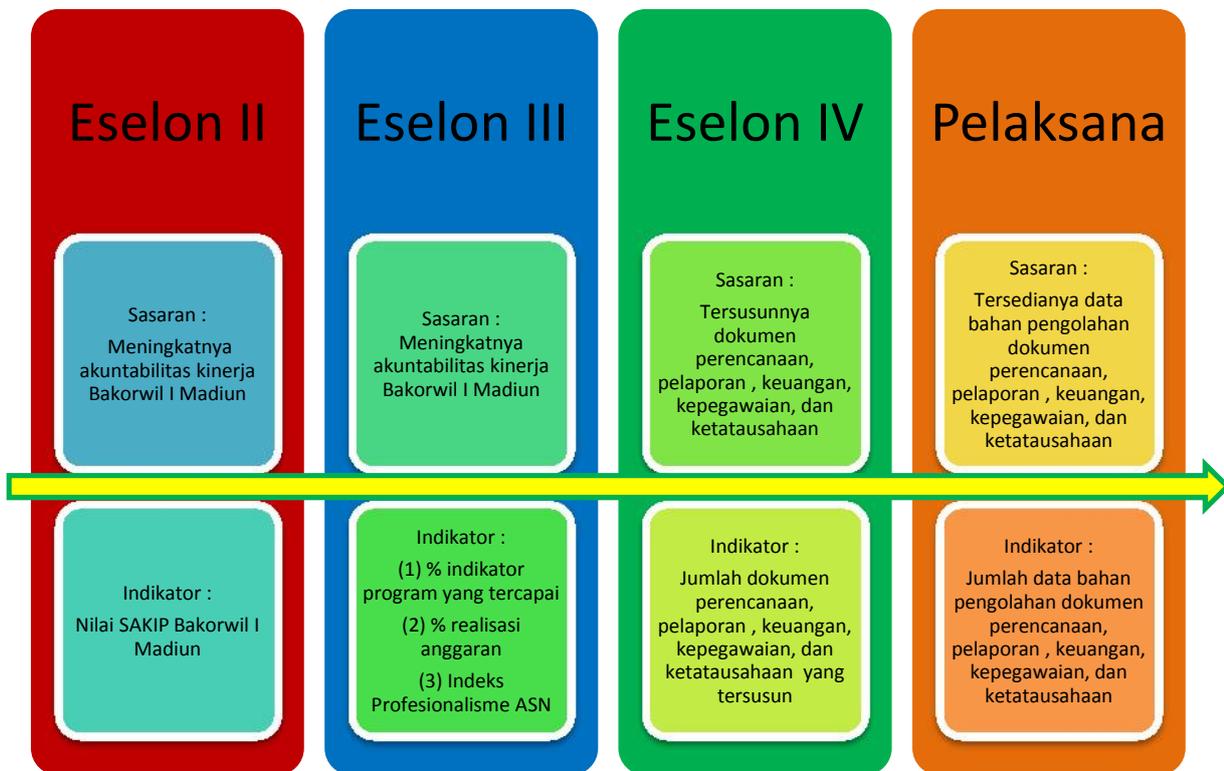
# CASCADING KINERJA

## SASARAN 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun

## INDIKATOR :

Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

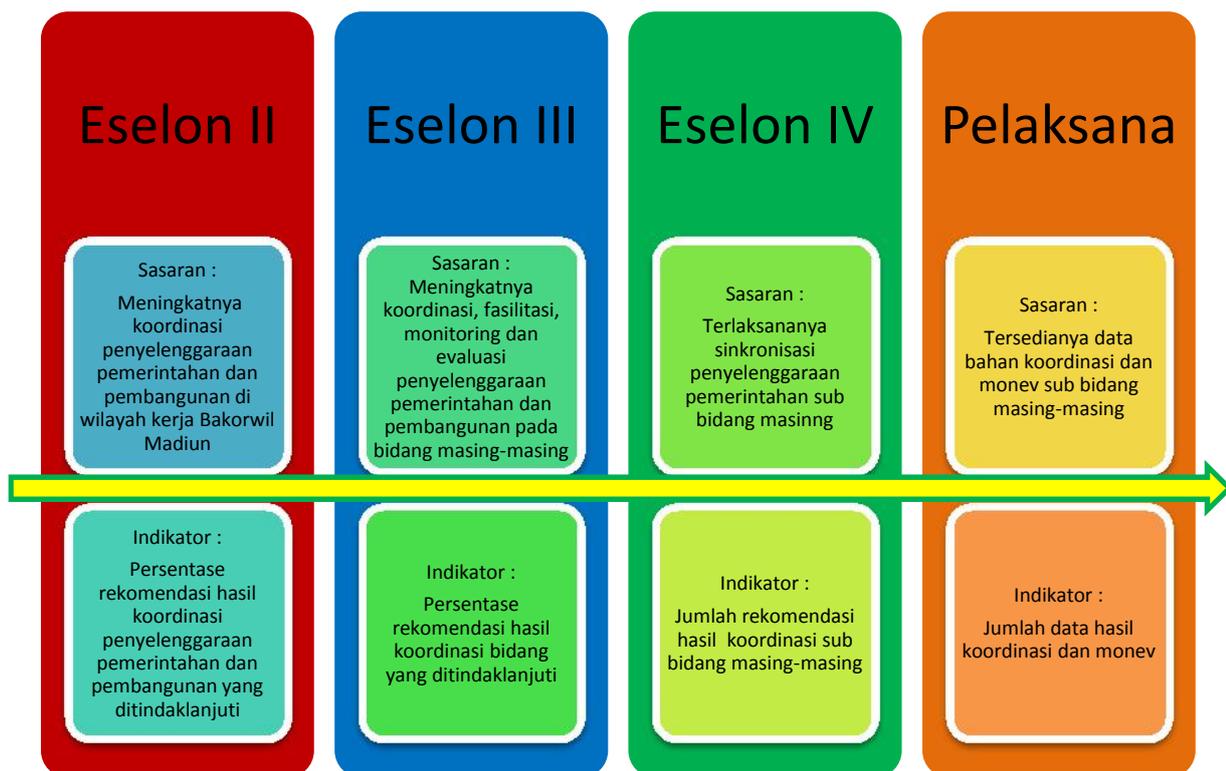


## SASARAN 2 :

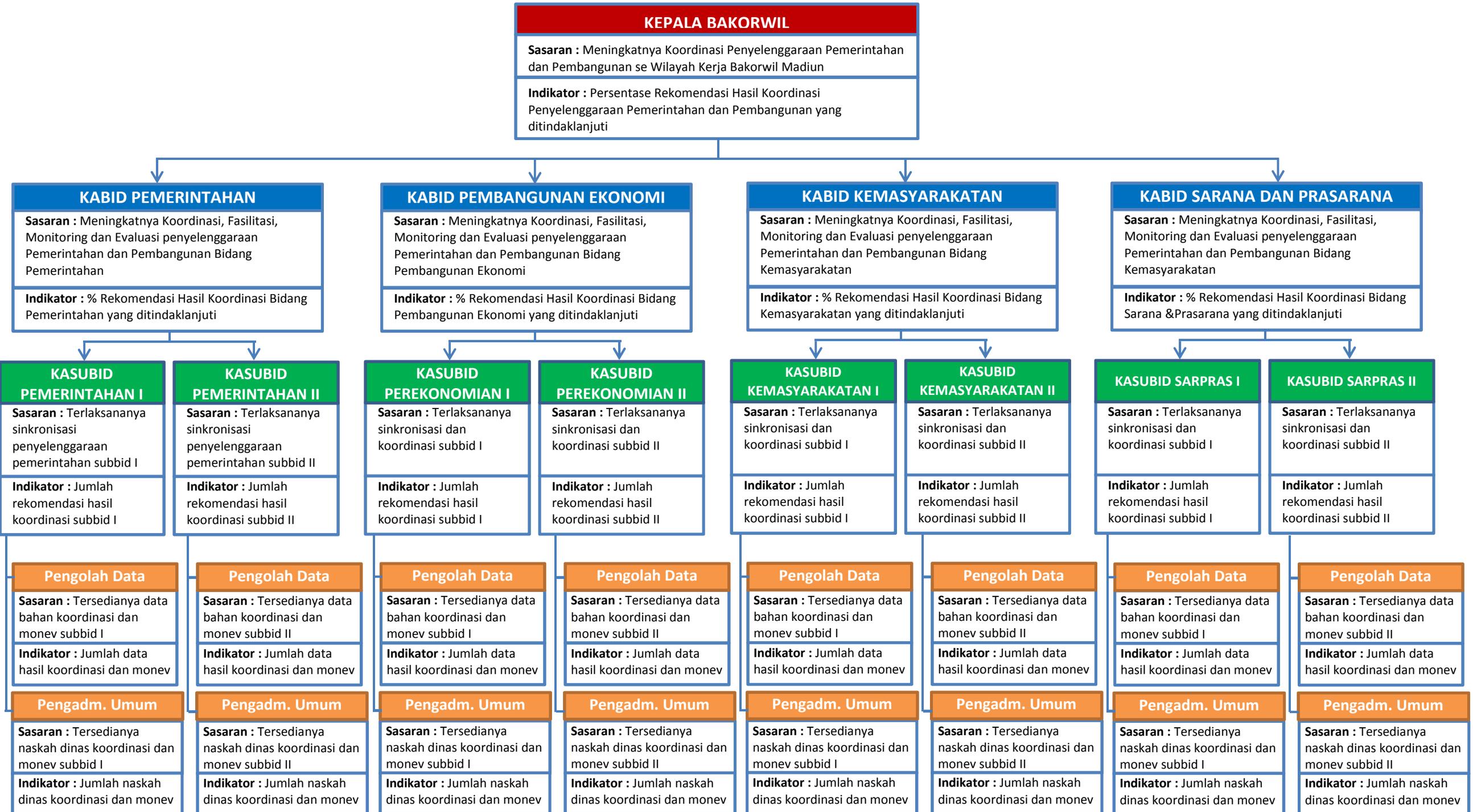
Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun

## INDIKATOR :

Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



# CASCADING KINERJA BAKORWIL I MADIUN





# **PROSES BISNIS BAKORWIL I MADIUN**

Powered by  
**bizagi**  
Modeler

## LEVEL 0

### P.6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

<b>P.6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>	 <p>P.6.7 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja</p>
--	--

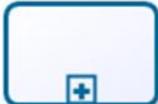
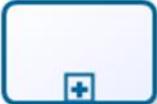
## LEVEL 1

### P.6.7 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja

<b>P.6.7 Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja</b>	 <p>P.6.7.1 Meningkatkan Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring, &amp; Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wvl. Kerja</p>
--	---

## LEVEL 2

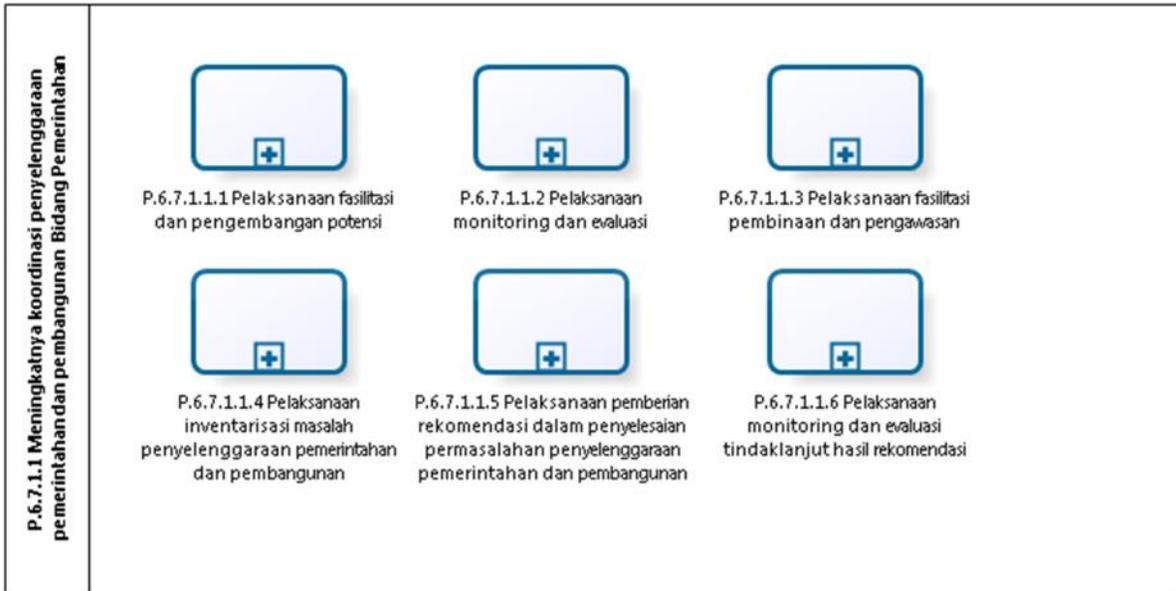
### P.6.7.1 Meningkatkan Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, & Monev Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan di Wilayah Kerja

<b>P.6.7.1 Meningkatkan Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, &amp; Monev Penyelenggaraan Pemerintahan &amp; Pembangunan di Wvl. Kerja</b>	 <p>P.6.7.1.1 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bidang Pemerintahan</p>	 <p>P.6.7.1.2 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi</p>
	 <p>P.6.7.1.3 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bidang Masyarakat</p>	 <p>P.6.7.1.4 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana</p>

## PROSES BISNIS BIDANG PEMERINTAHAN

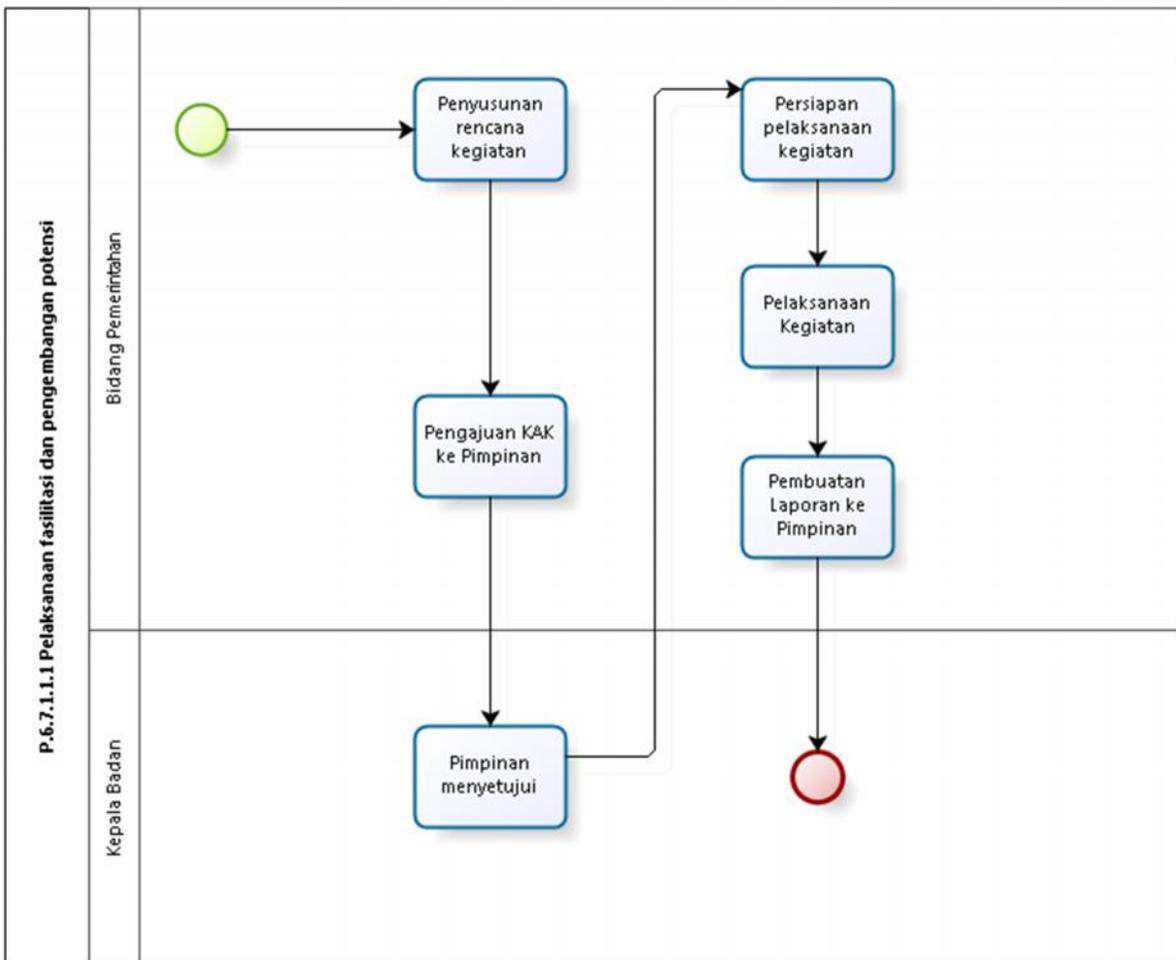
### LEVEL 3

#### P.6.7.1.1 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bidang Pemerintahan



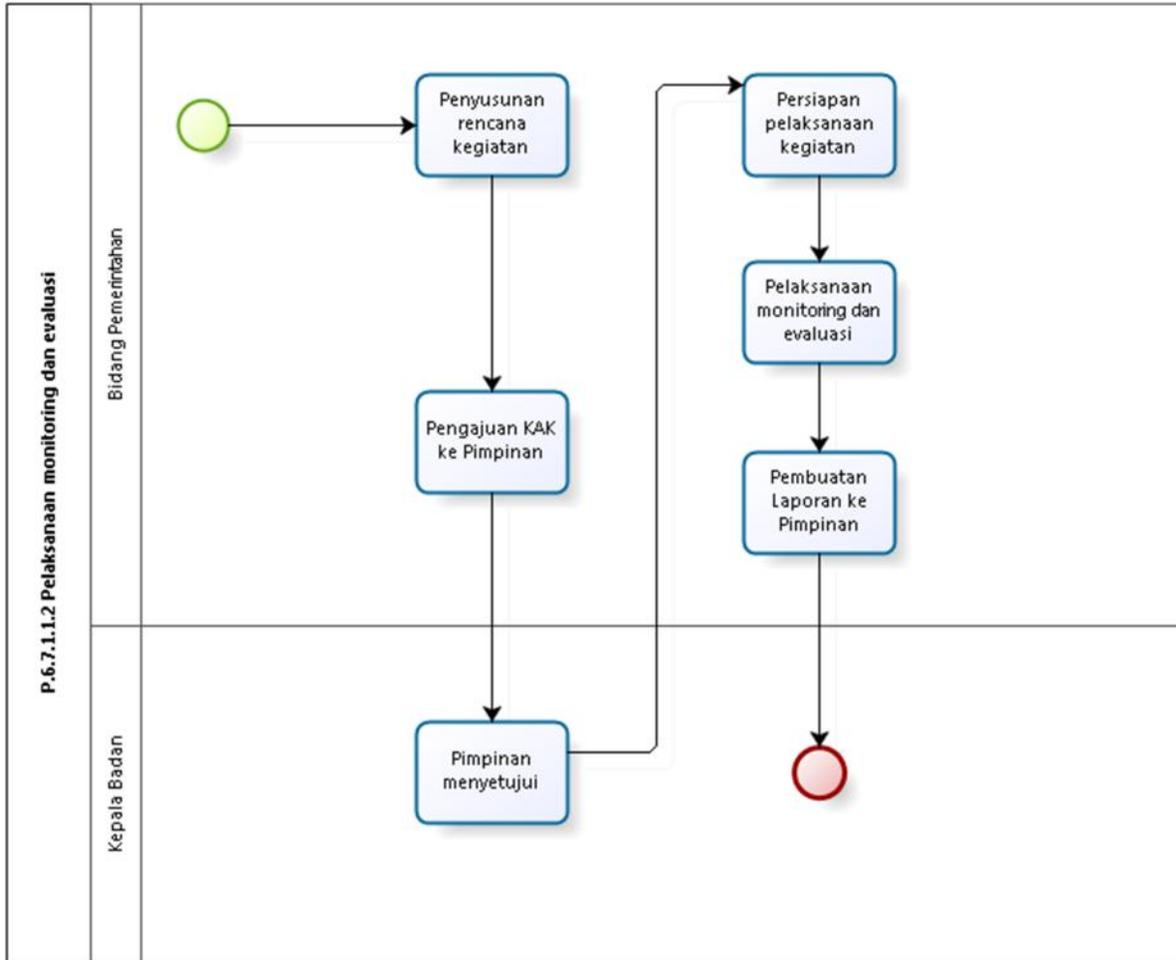
### SOP 1

#### P.6.7.1.1.1 Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan potensi



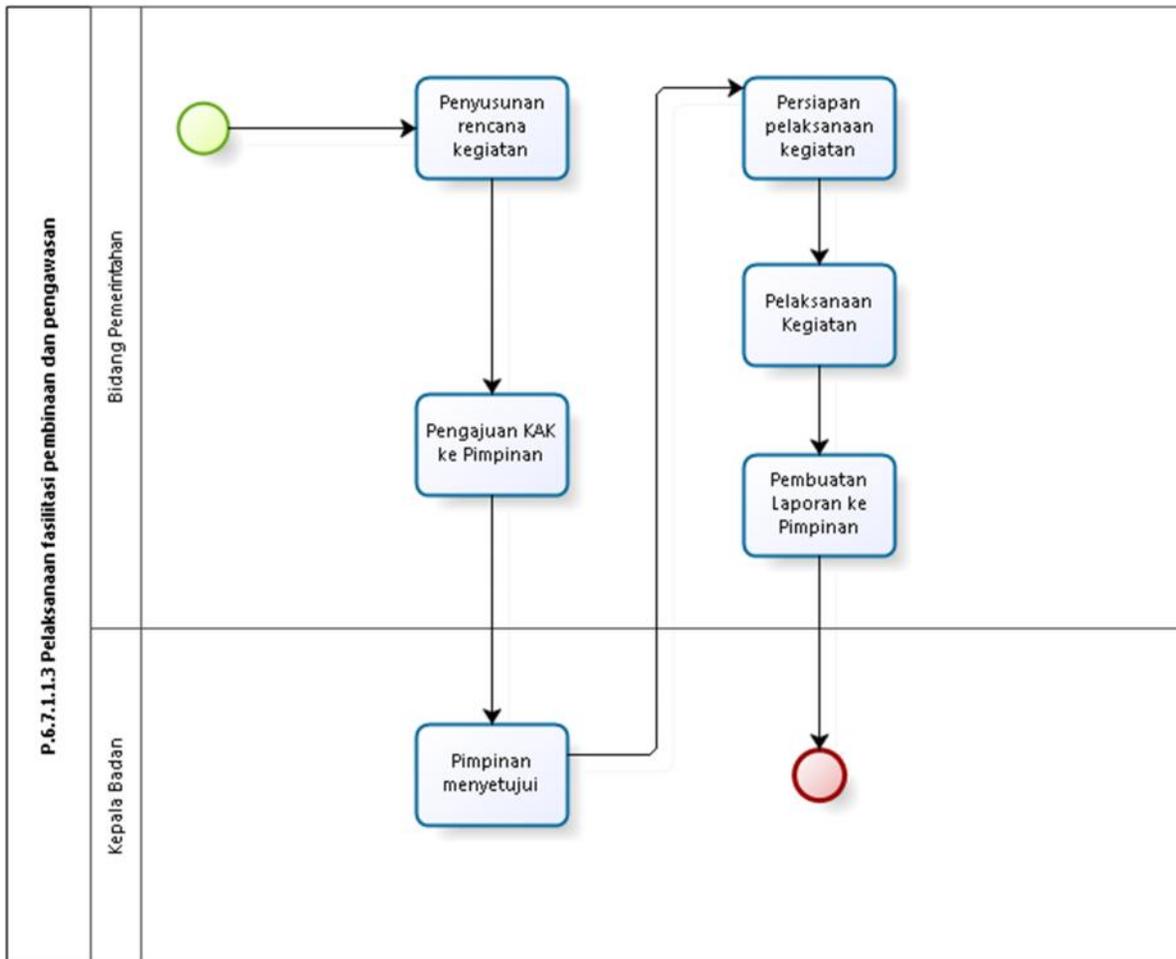
SOP 2

P.6.7.1.1.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi



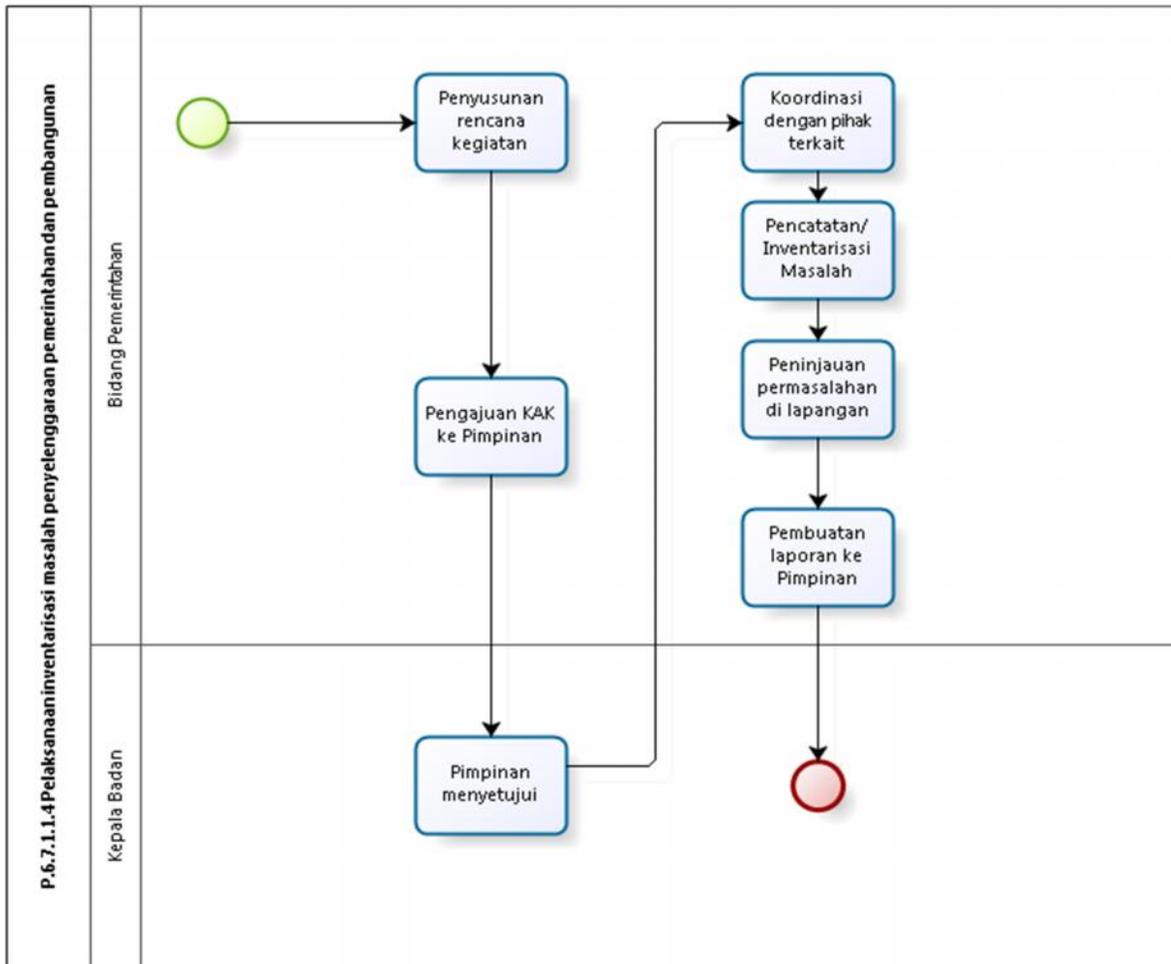
SOP 3

P.6.7.1.1.3 Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan



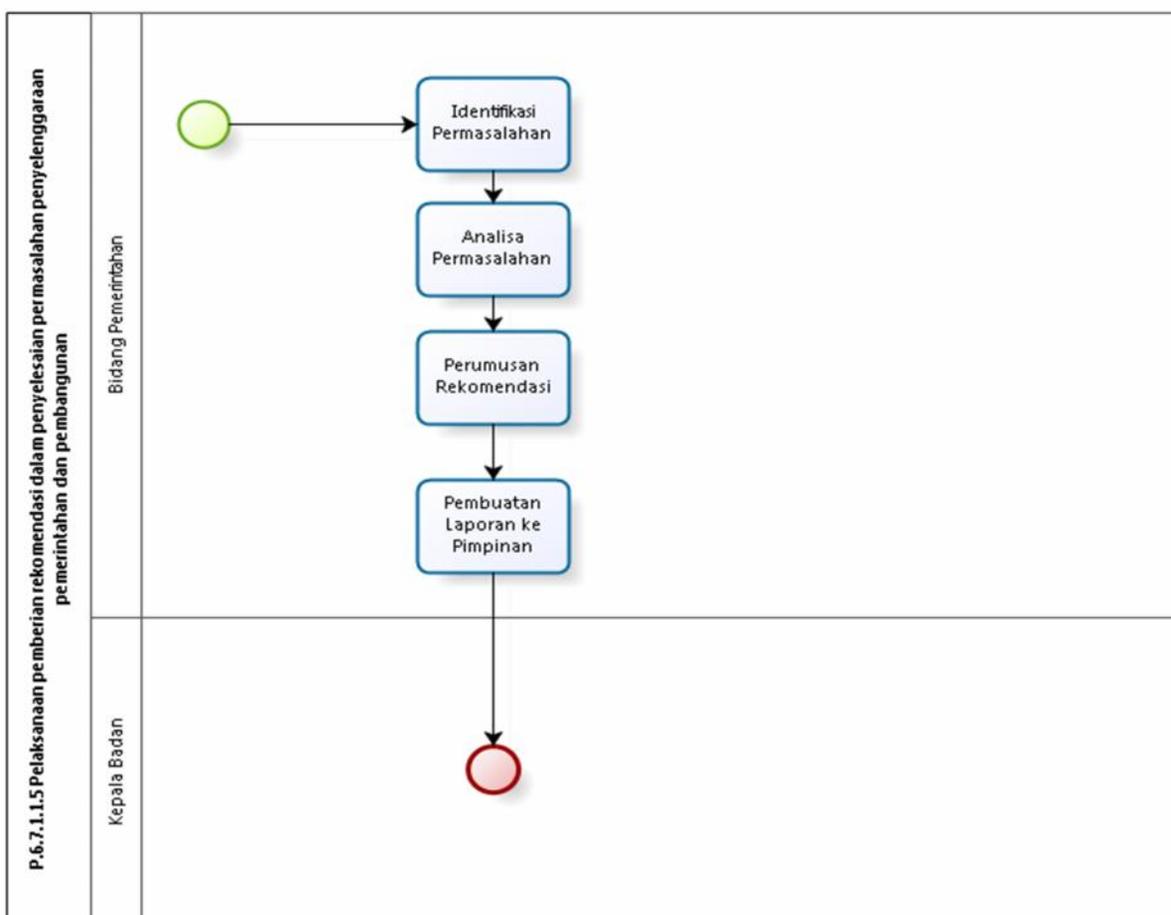
SOP 4

P.6.7.1.1.4 Pelaksanaan inventarisasi masalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



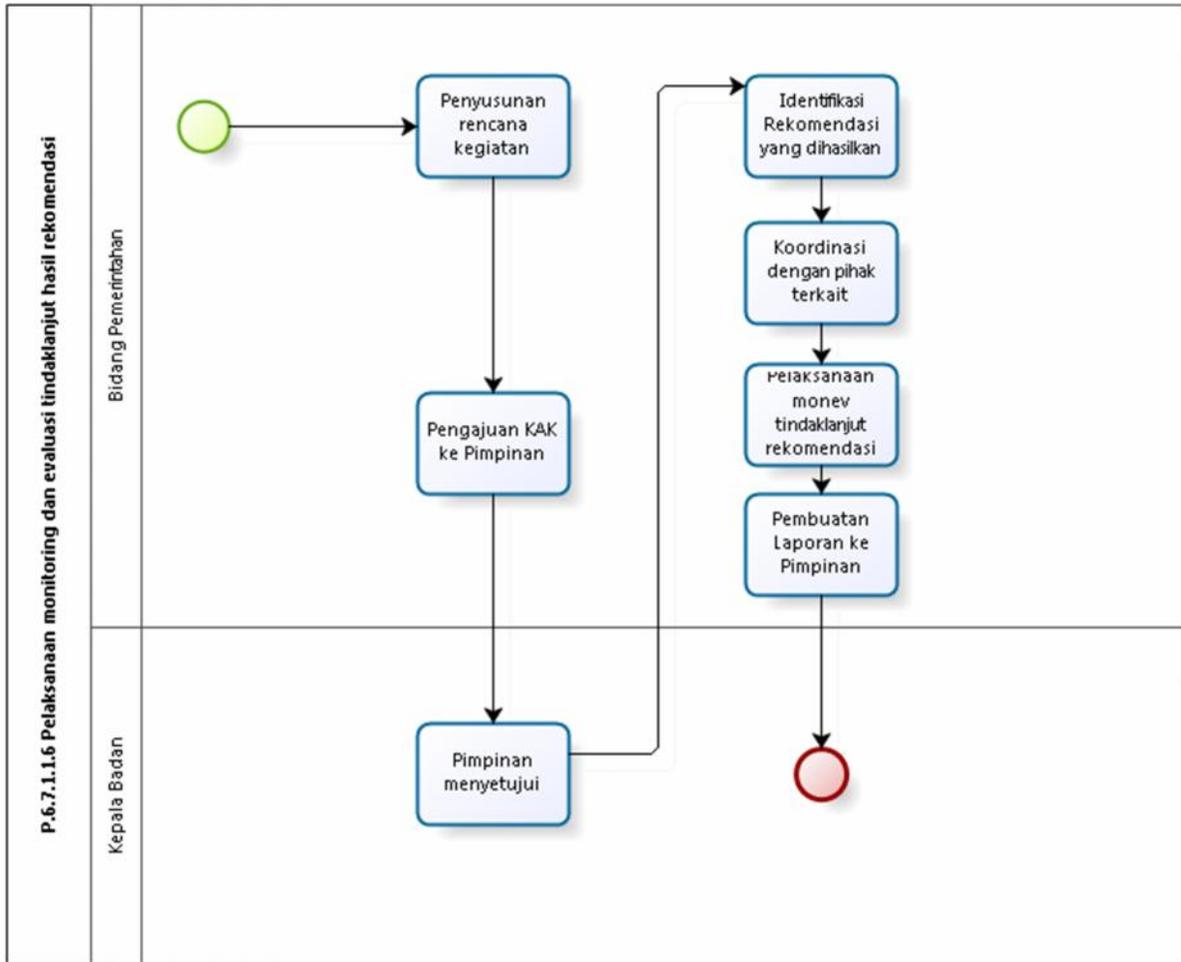
SOP 5

P.6.7.1.1.5 Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



SOP 6

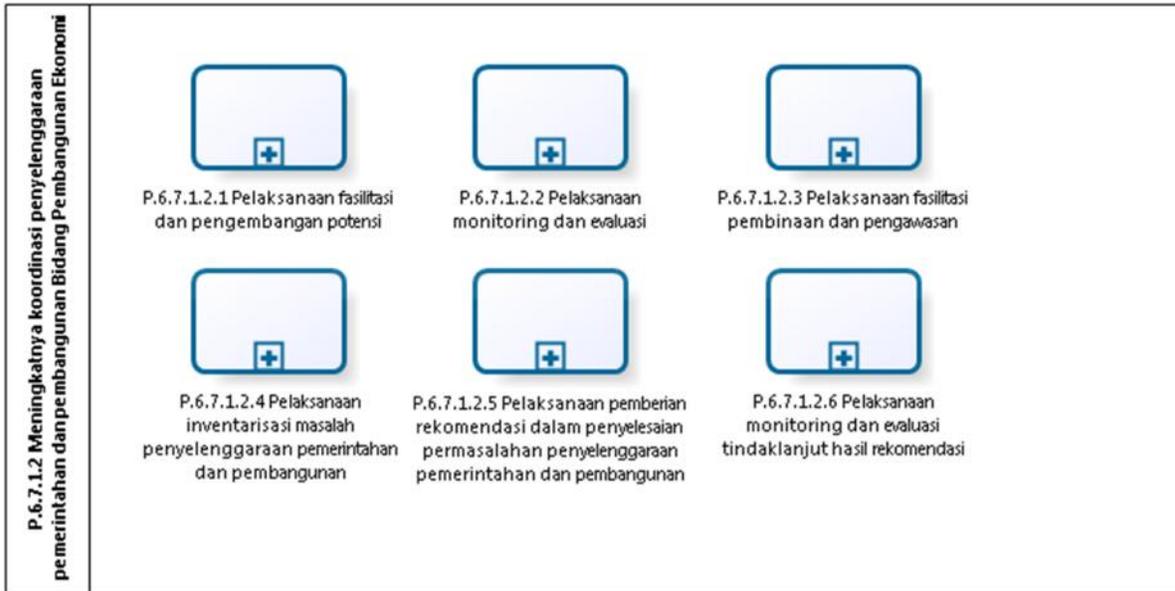
P.6.7.1.1.6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil rekomendasi



## PROSES BISNIS BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI

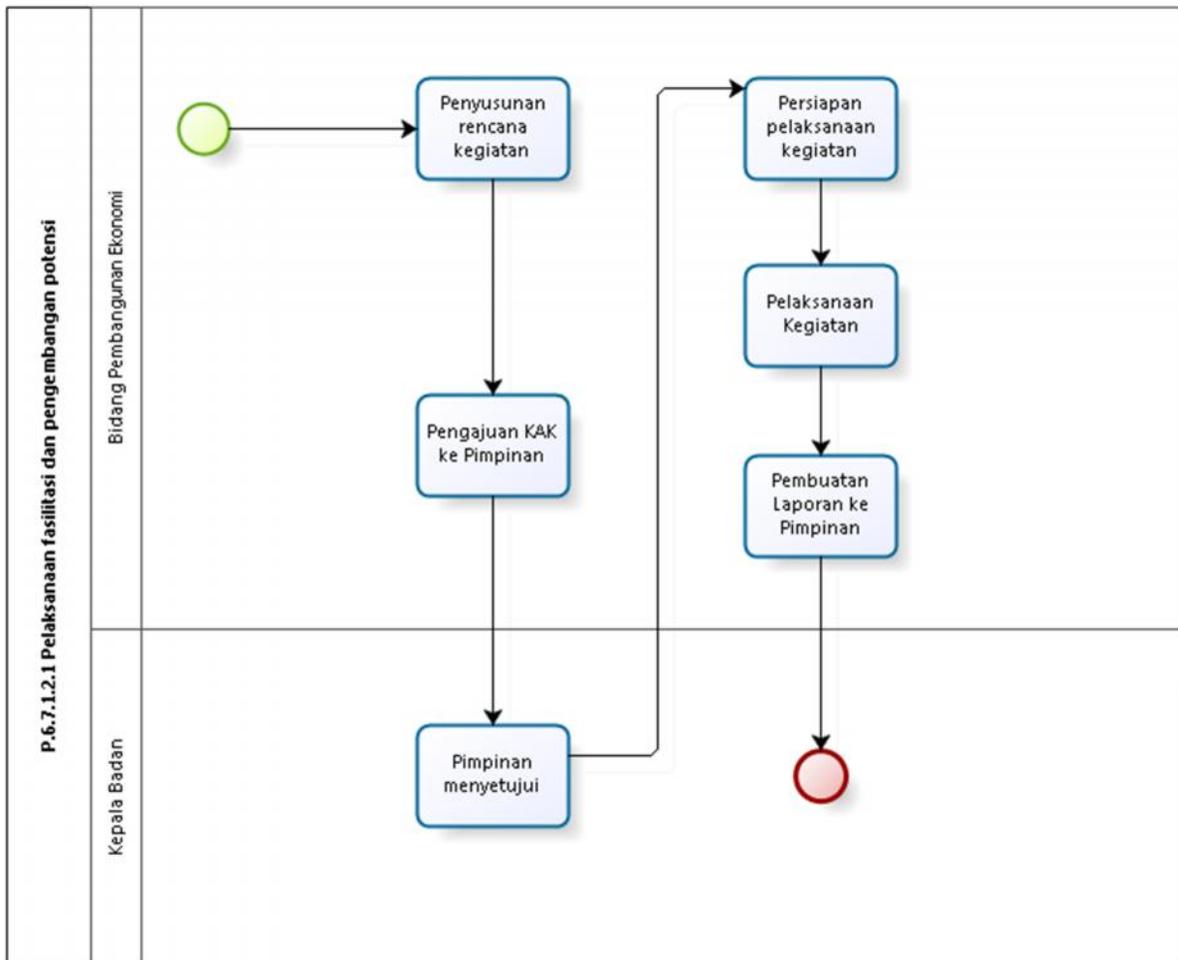
### LEVEL 3

#### P.6.7.1.2 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi



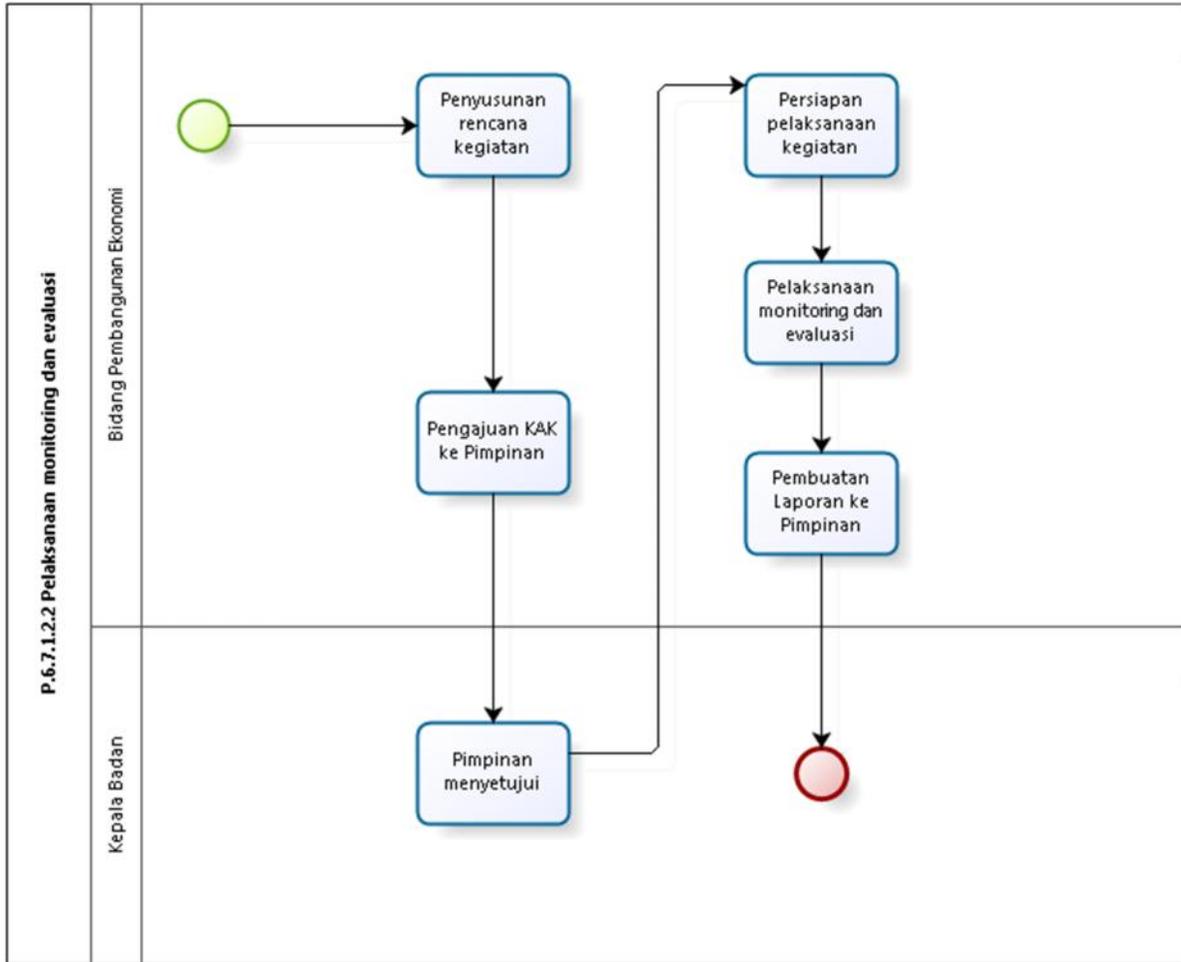
### SOP 1

#### P.6.7.1.2.1 Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan potensi



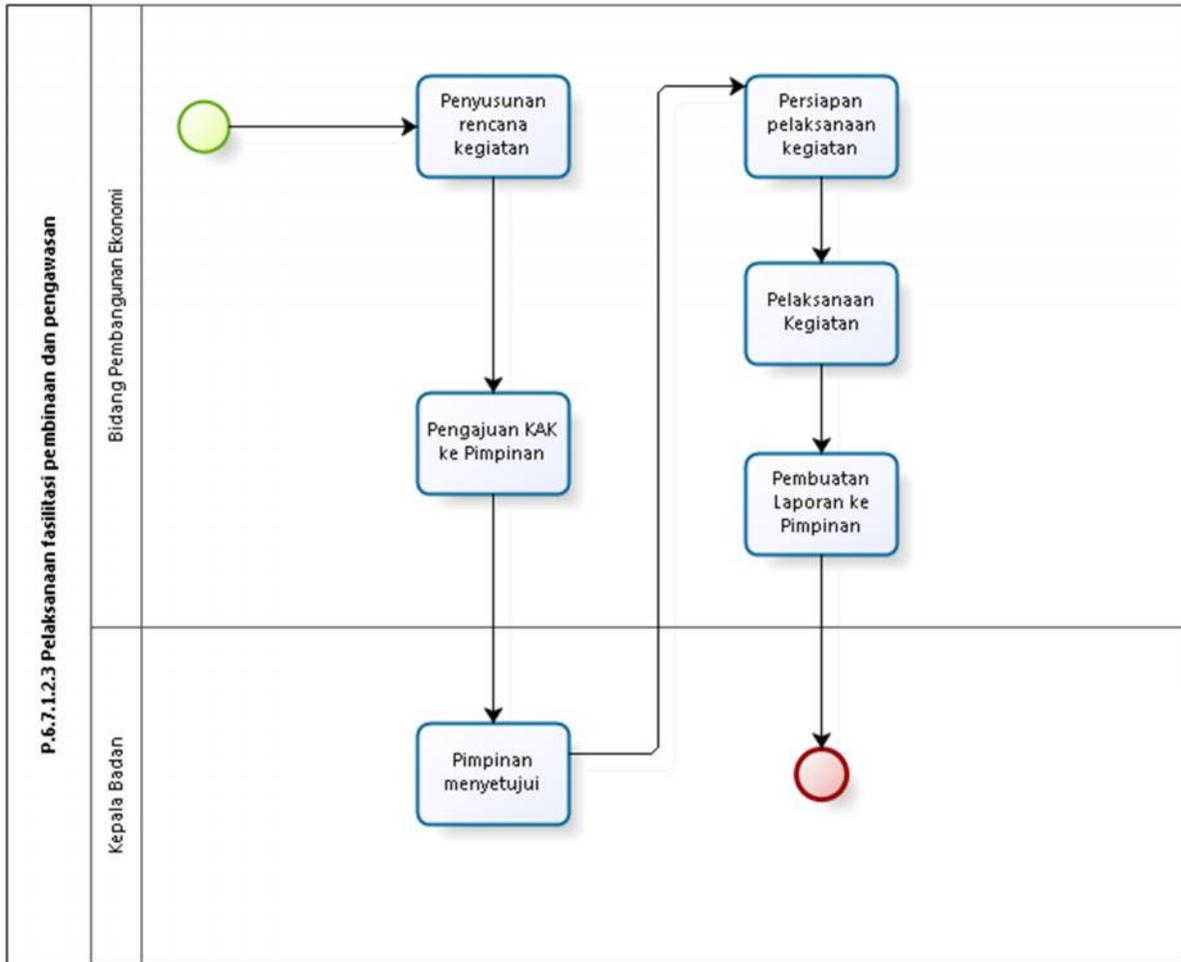
SOP 2

P.6.7.1.2.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi



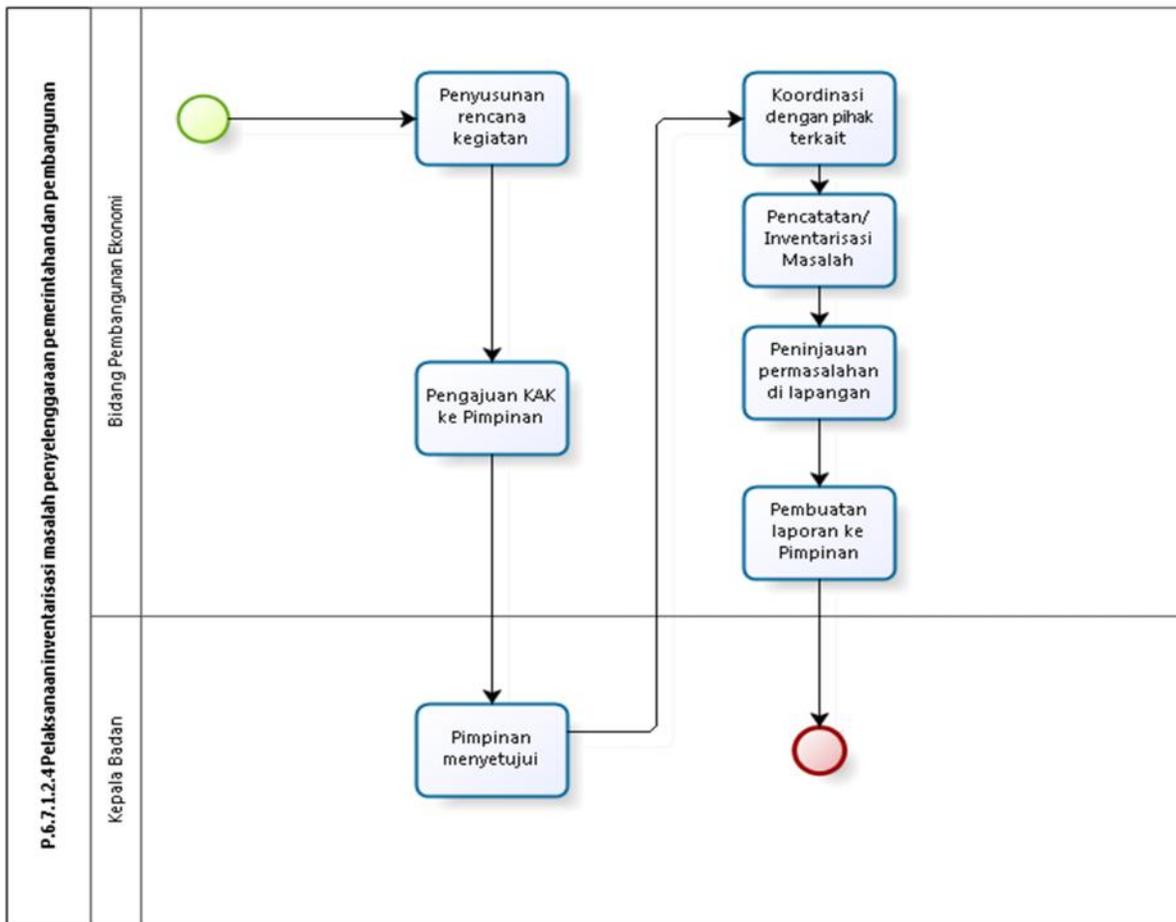
SOP 3

P.6.7.1.2.3 Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan



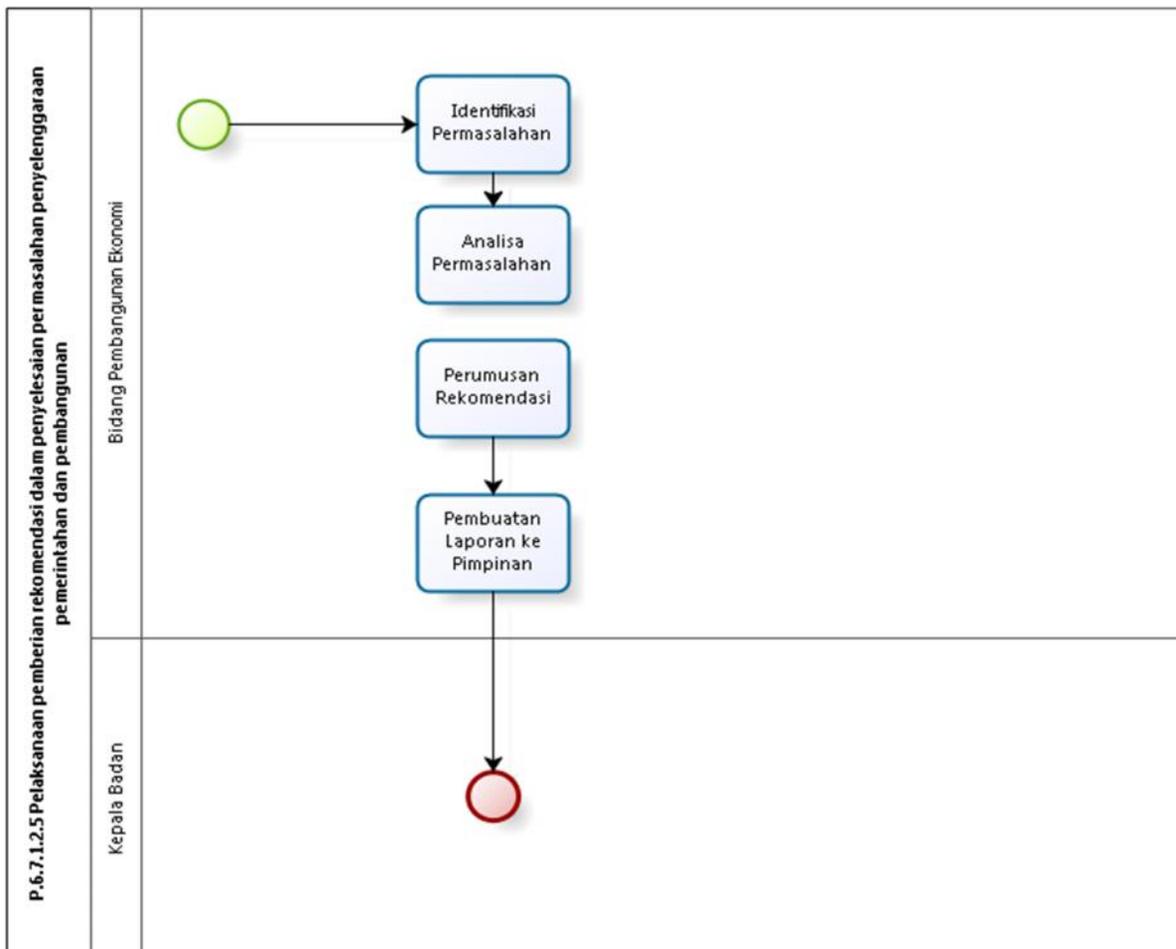
SOP 4

P.6.7.1.2.4 Pelaksanaan inventarisasi masalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



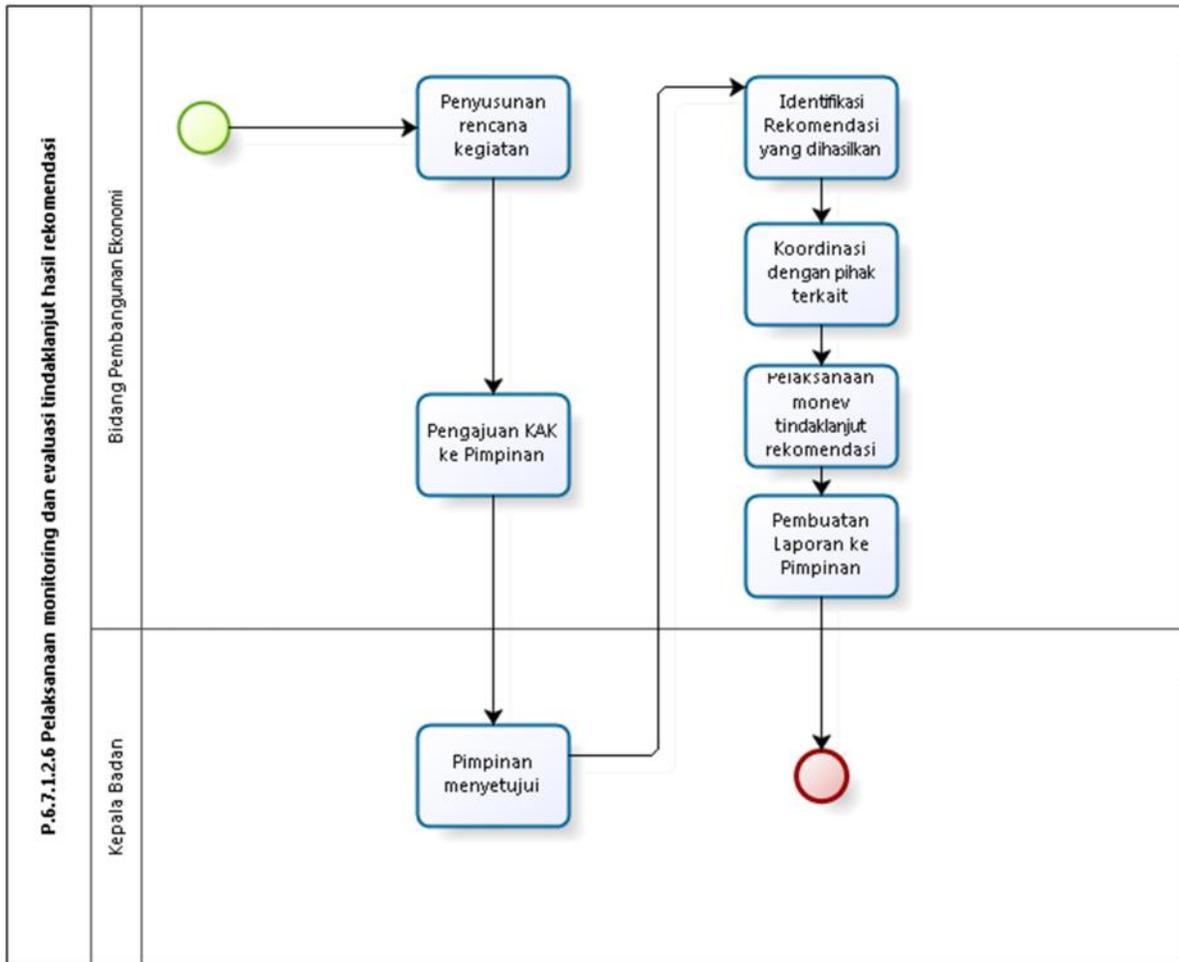
SOP 5

P.6.7.1.2.5 Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



SOP 6

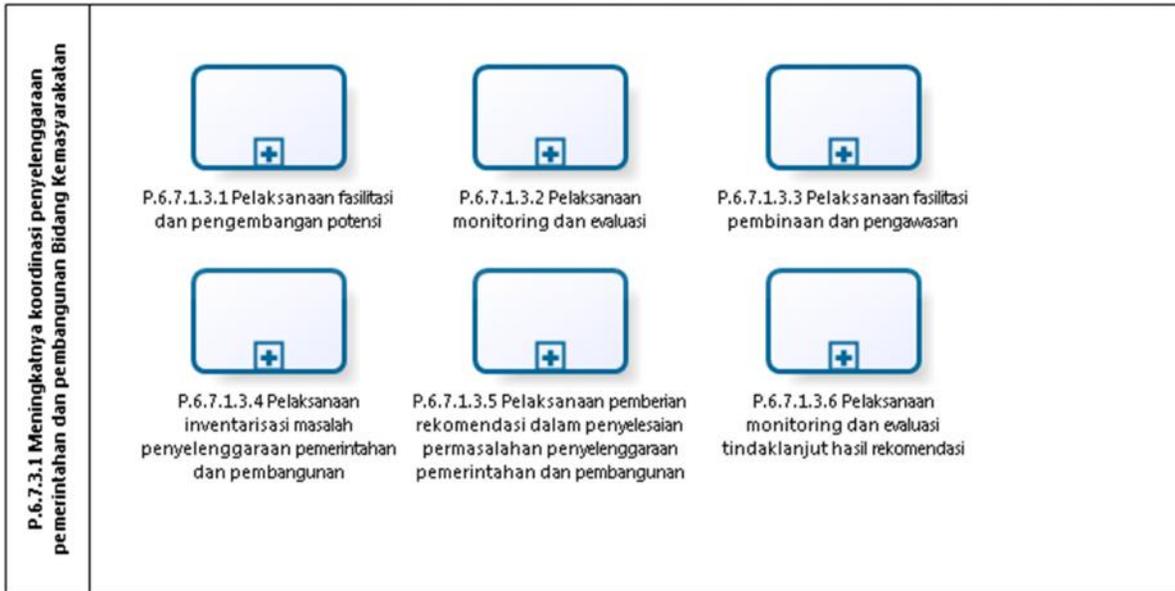
P.6.7.1.2.6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil rekomendasi



## PROSES BISNIS BIDANG KEMASYARAKATAN

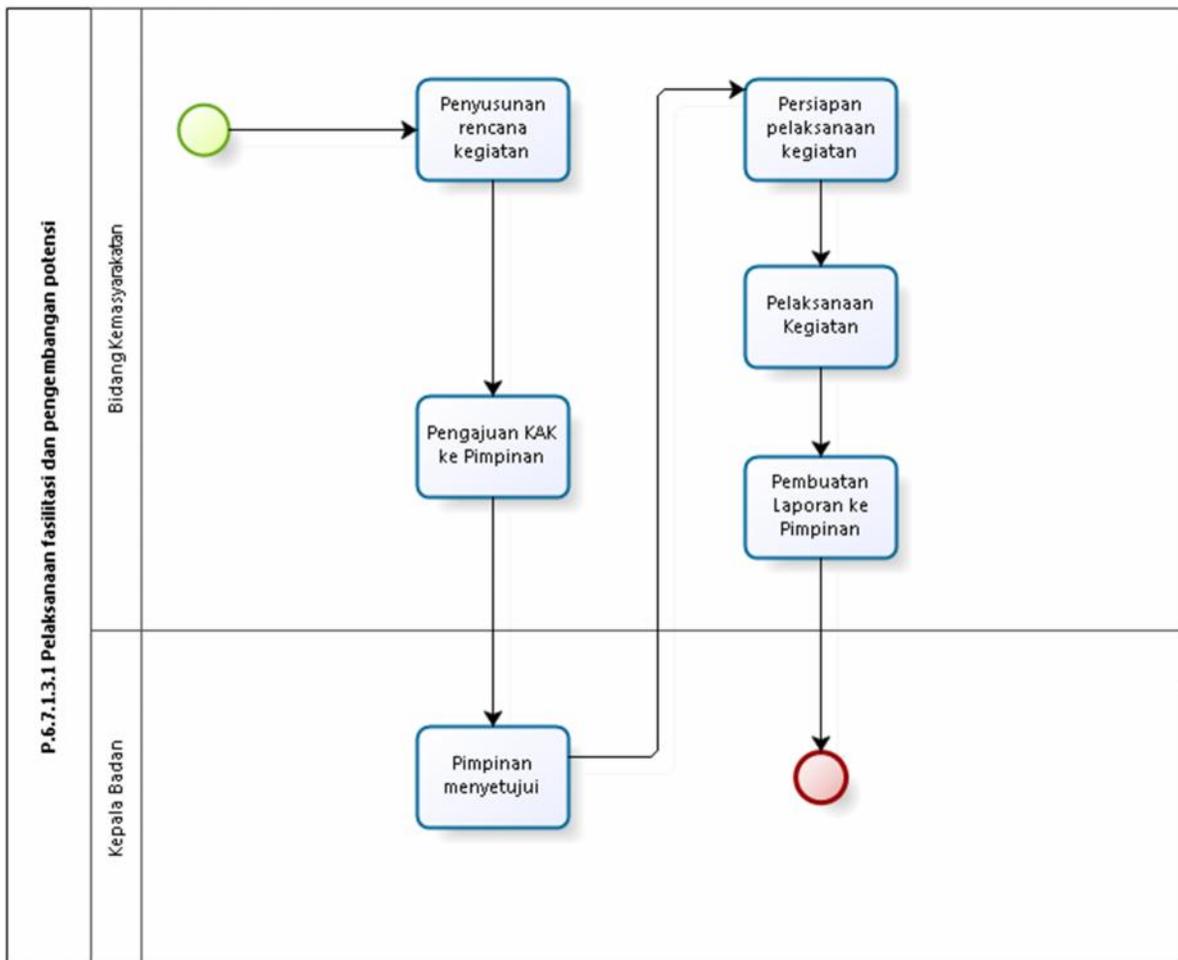
### LEVEL 3

#### P.6.7.1.3 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bidang Kemasyarakatan



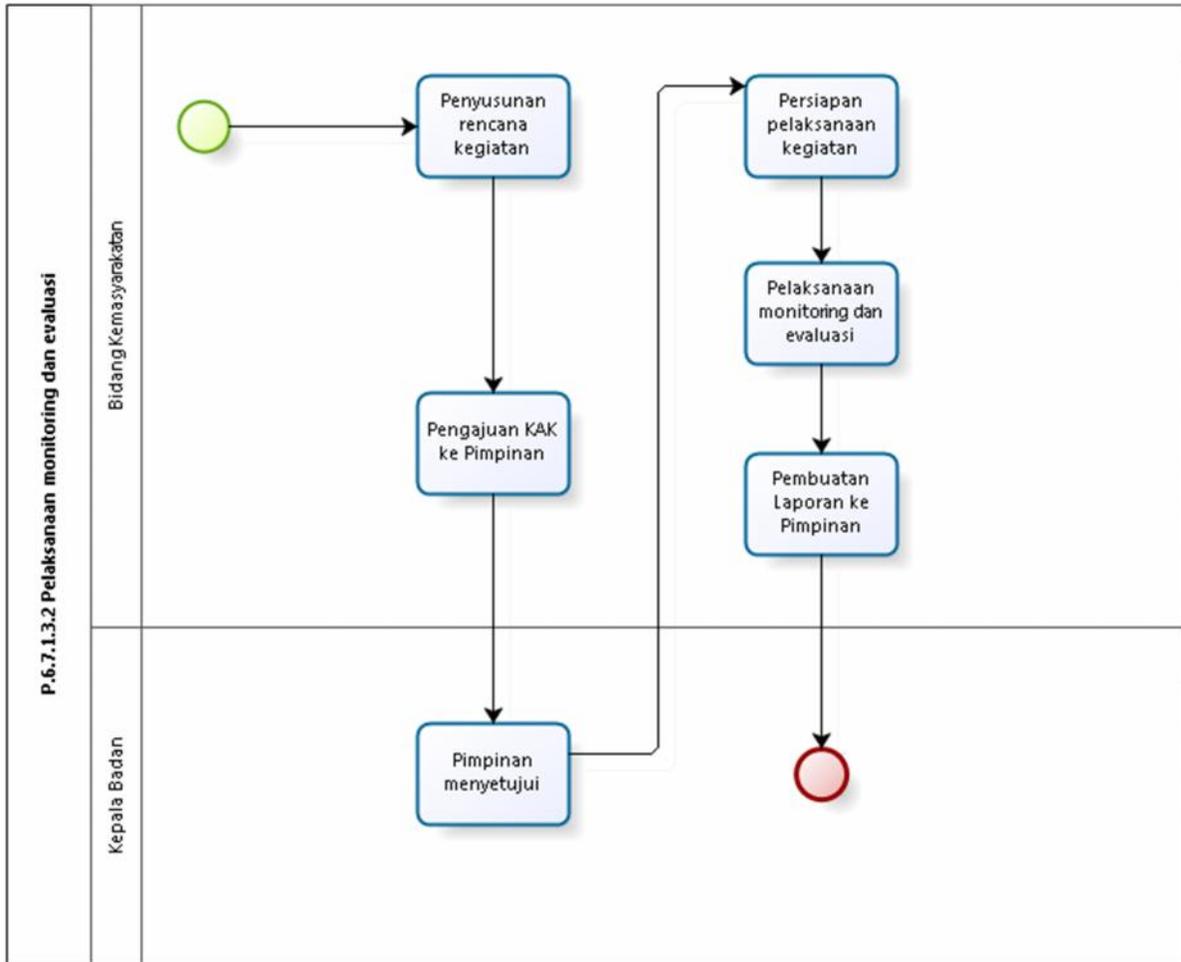
### SOP 1

#### P.6.7.1.3.1 Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan potensi



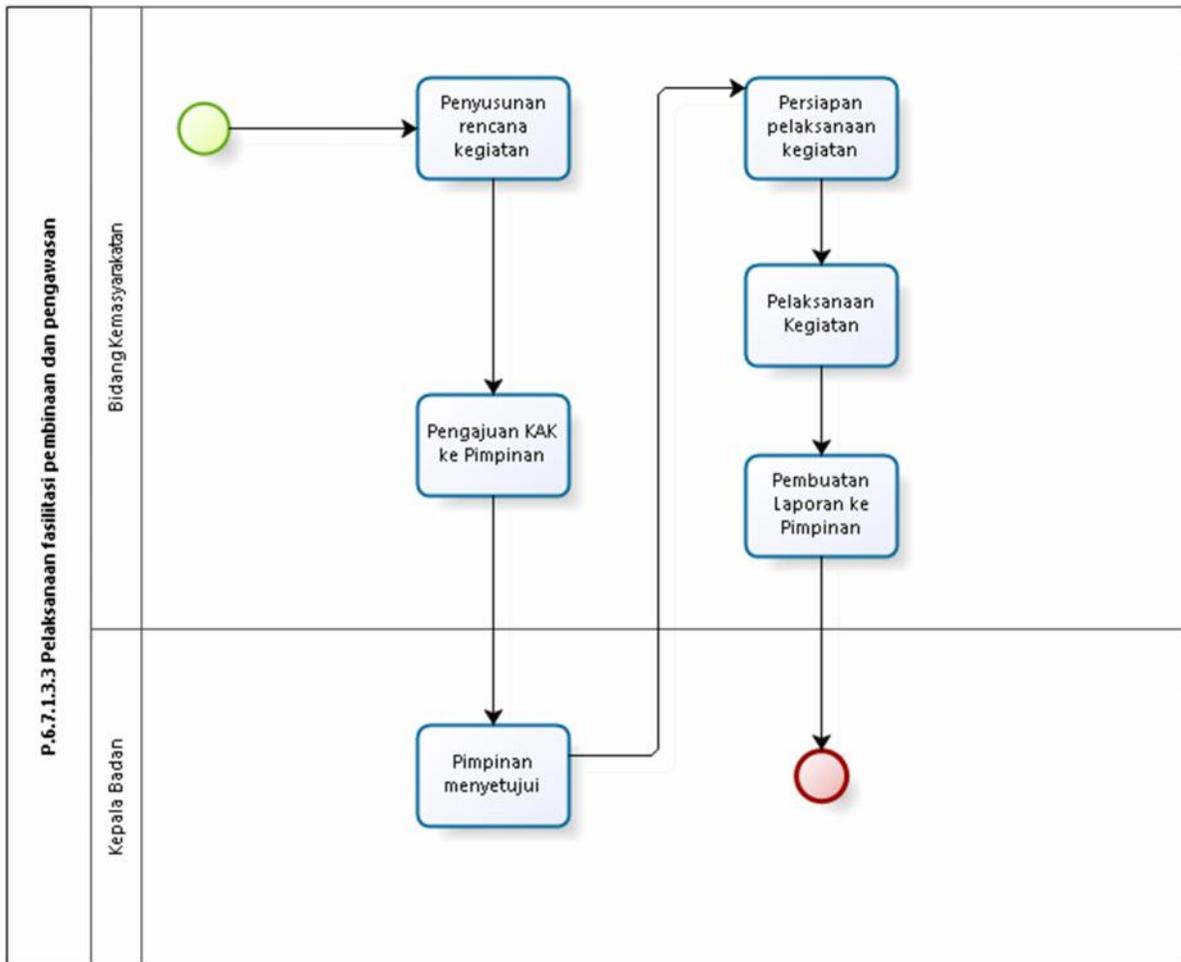
SOP 2

P.6.7.1.3.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi



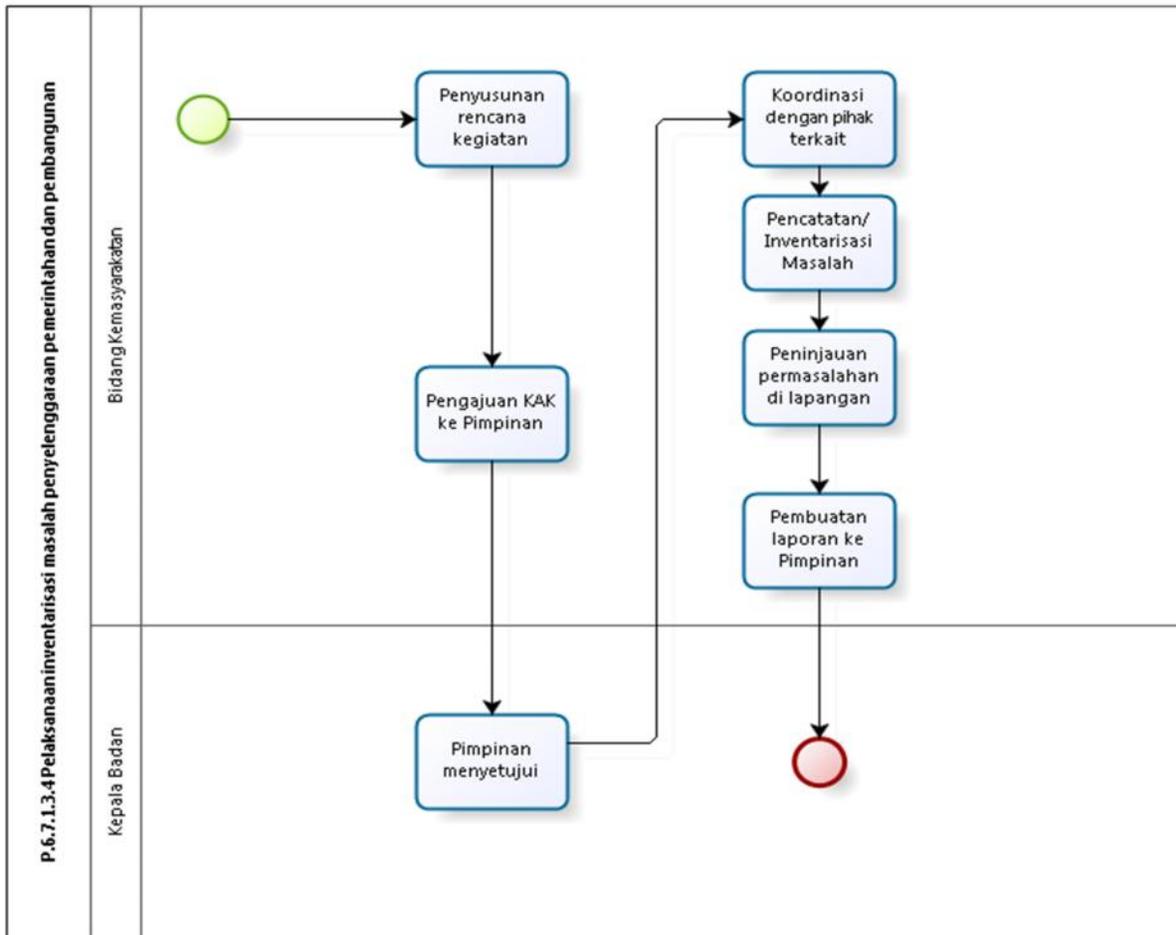
SOP 3

P.6.7.1.3.3 Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan



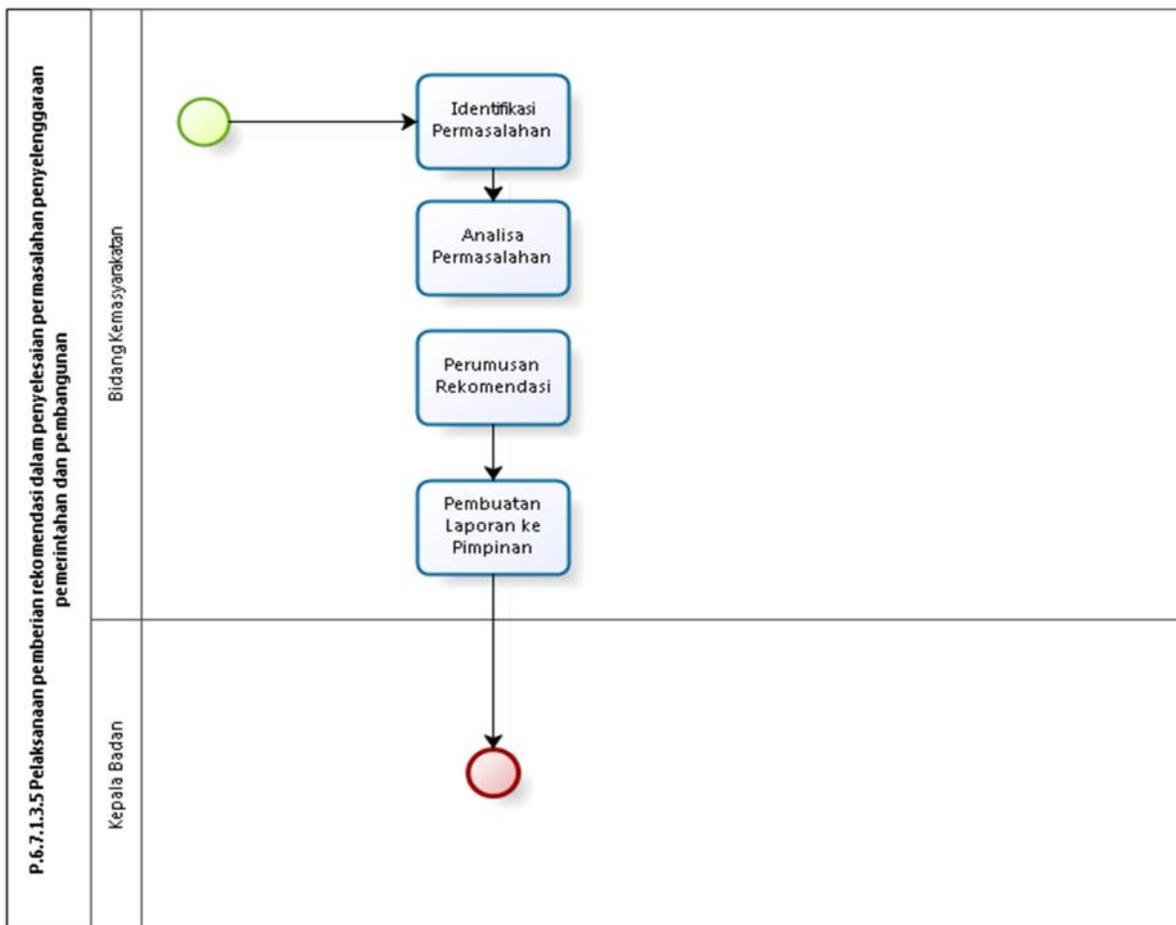
SOP 4

P.6.7.1.3.4 Pelaksanaan inventarisasi masalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



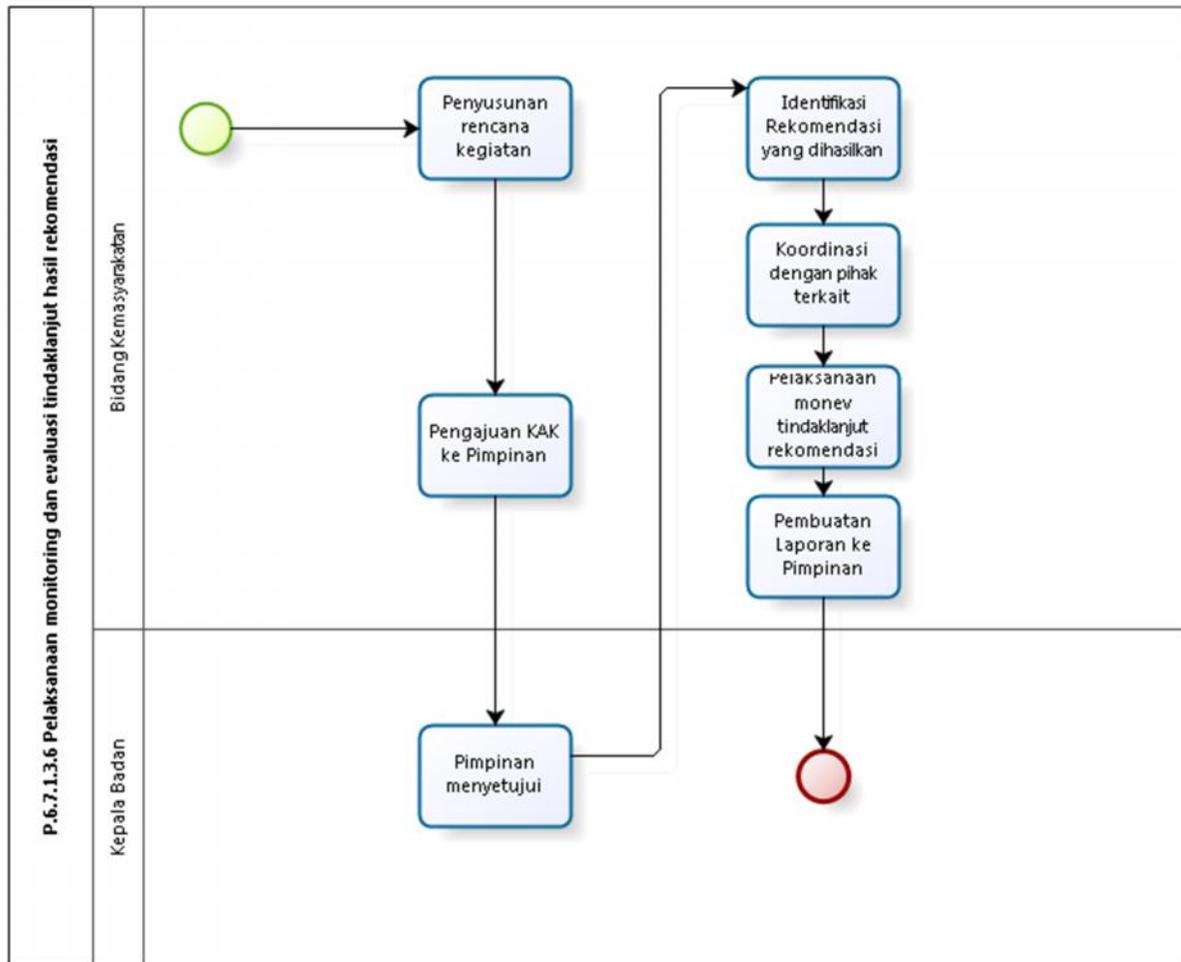
SOP 5

P.6.7.1.3.5 Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



SOP 6

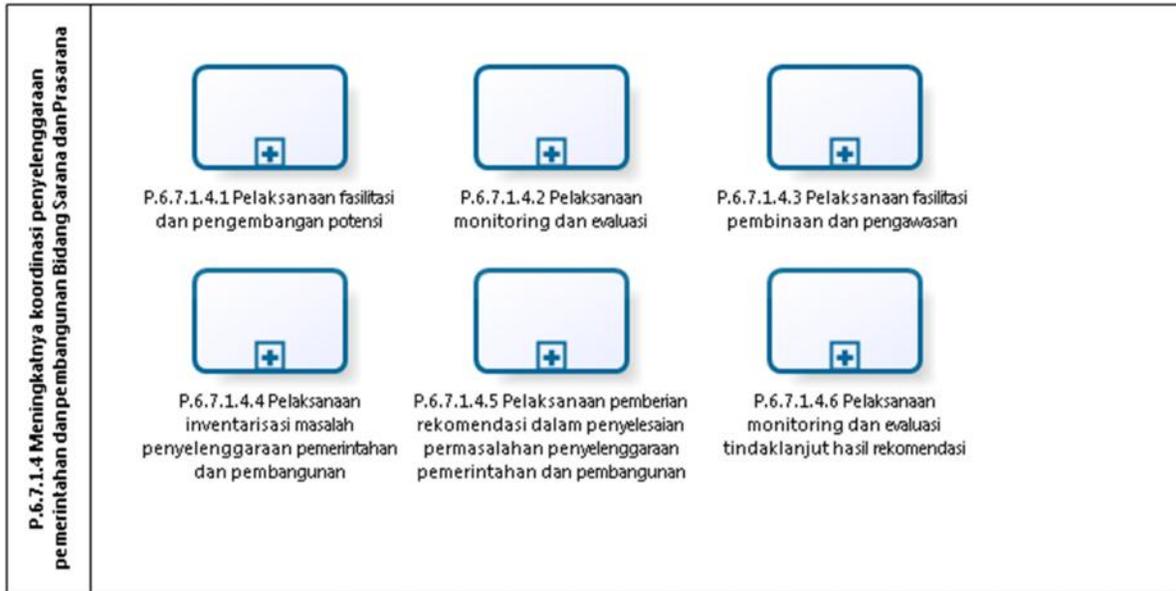
P.6.7.1.3.6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil rekomendasi



## PROSES BISNIS BIDANG SARANA DAN PRASARANA

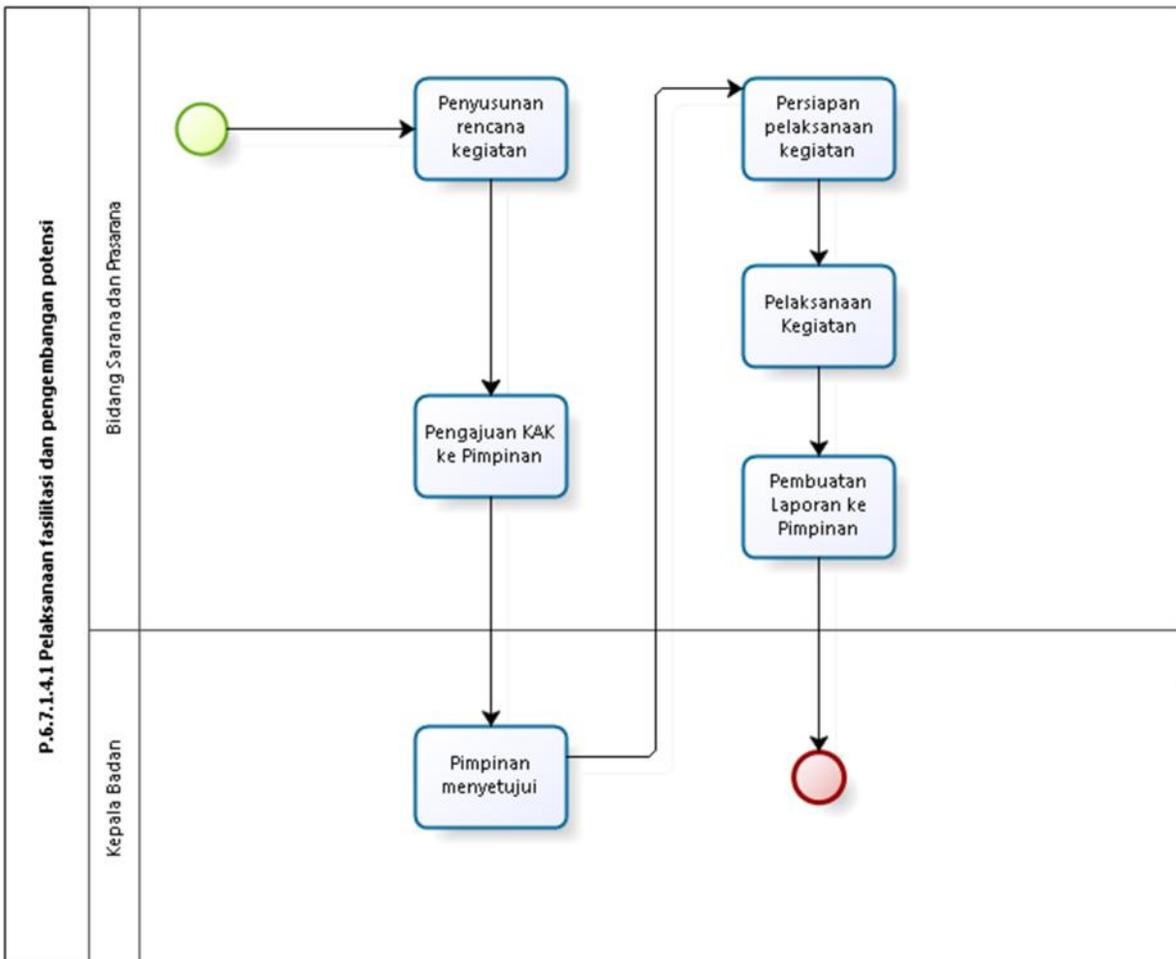
### LEVEL 3

#### P.6.7.1.4 Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana



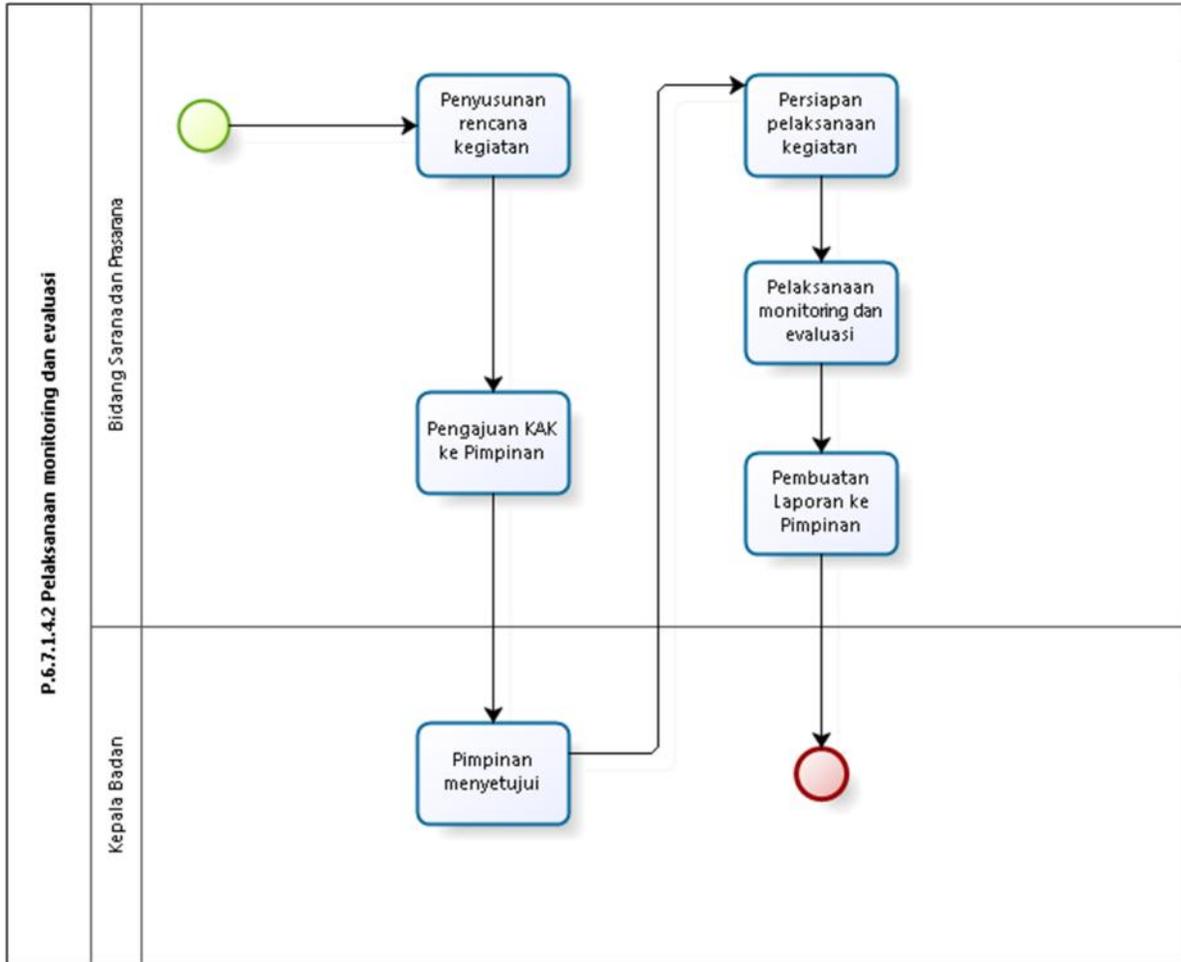
### SOP 1

#### P.6.7.1.4.1 Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan potensi



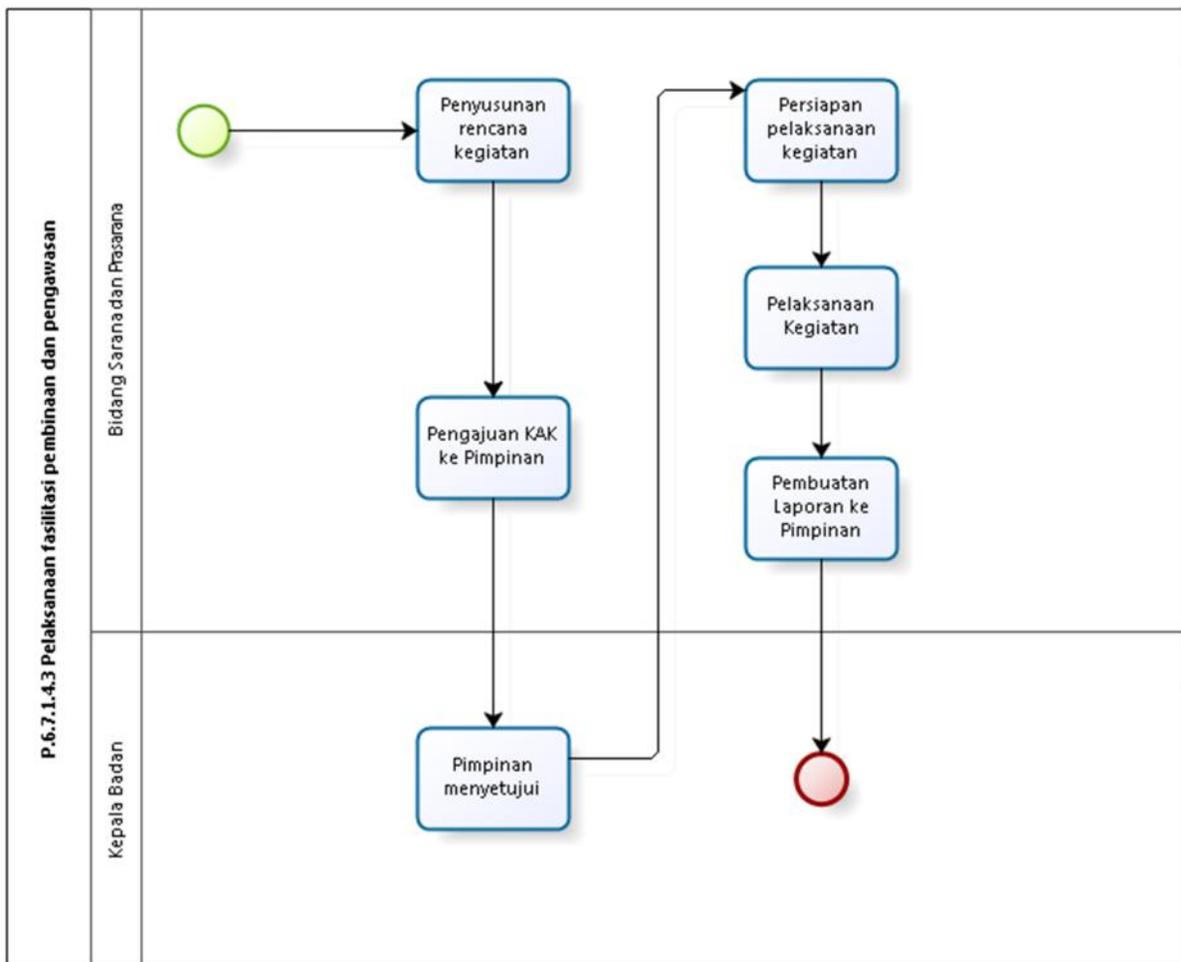
SOP 2

P.6.7.1.4.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi



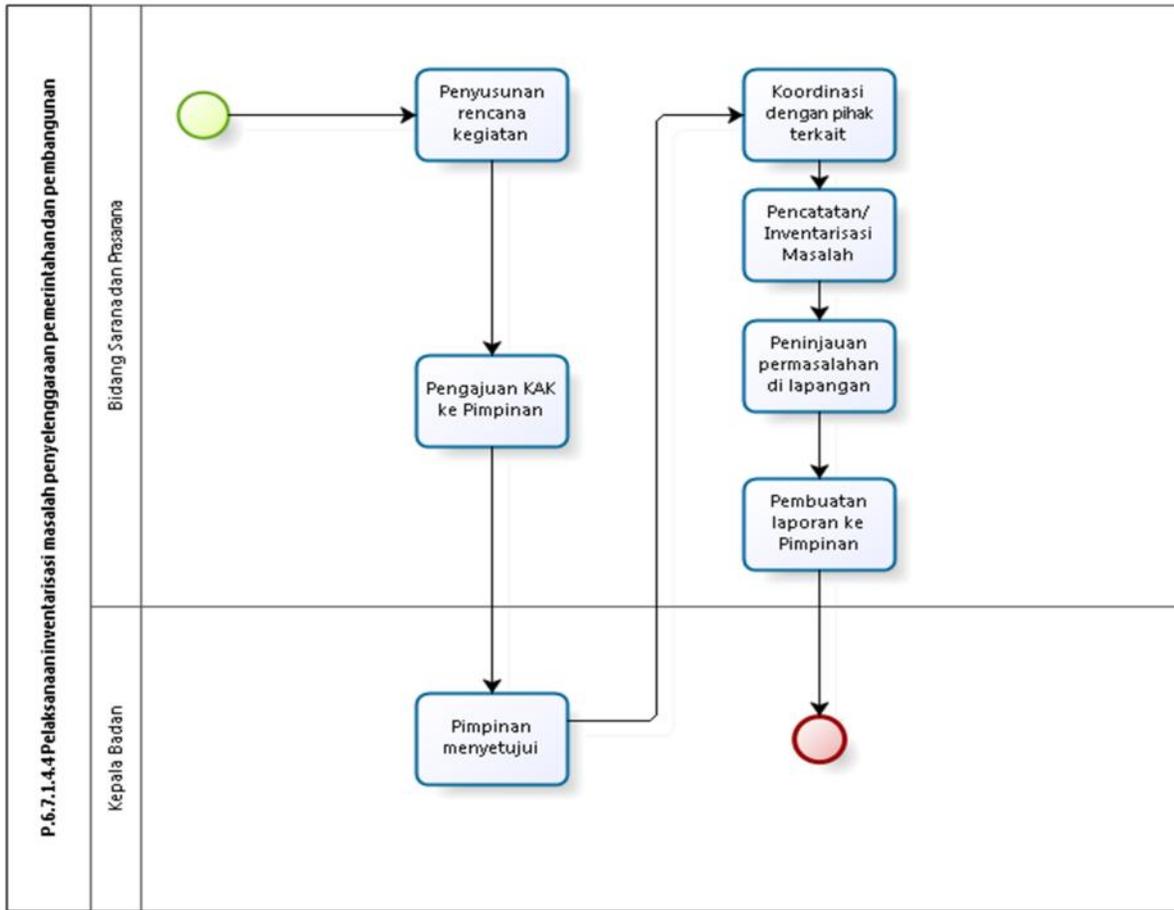
SOP 3

P.6.7.1.4.3 Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan



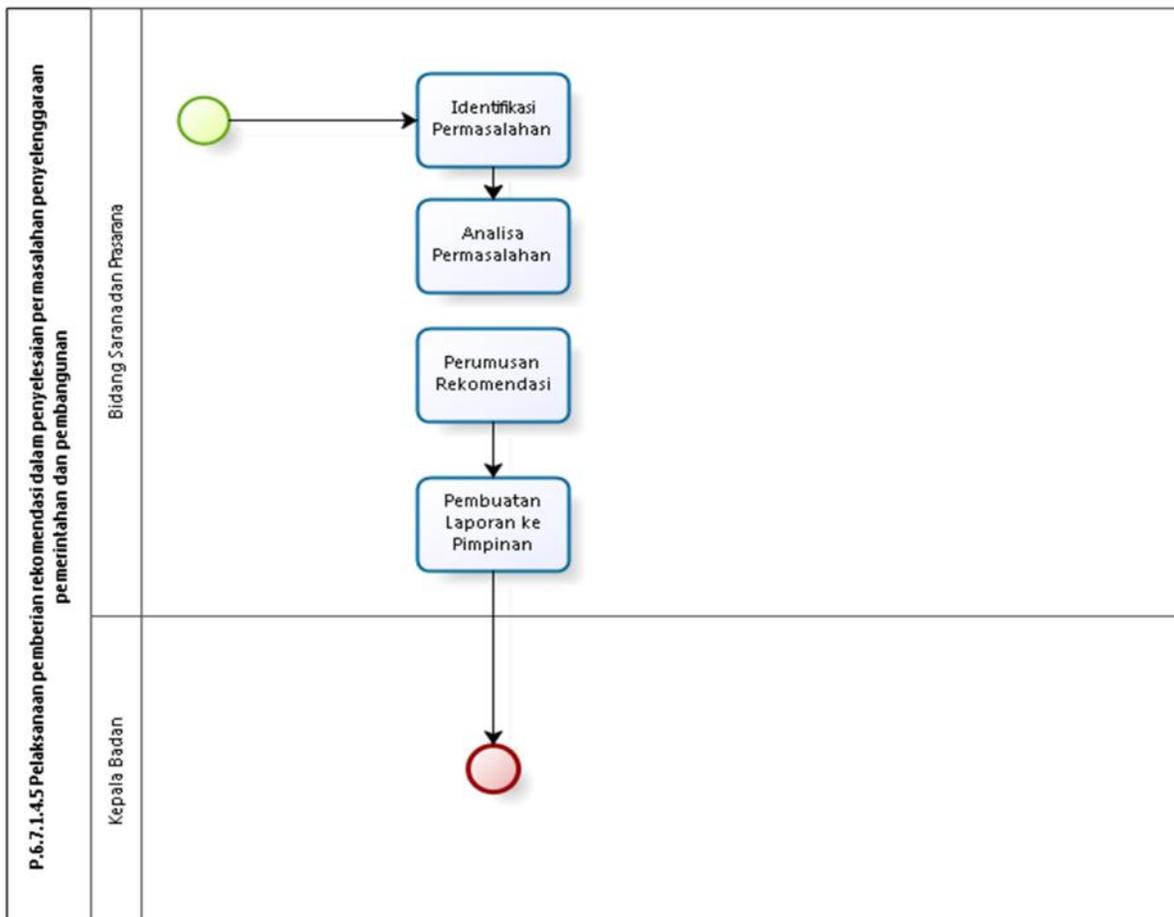
SOP 4

P.6.7.1.4.4 Pelaksanaan inventarisasi masalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



SOP 5

P.6.7.1.4.5 Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



SOP 6

P.6.7.1.4.6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil rekomendasi

